

**MODEL KOMUNIKASI DAN
STRATEGI KEBIJAKAN KESADARAN
ANTI KORUPSI MELALUI PENDEKATAN
CHARACTER BUILDING BERBASIS LITERASI
MEDIA**

**Oleh :
Gatut Priyowidodo, Ph.D
Yustisia Ditya Sari, M.I.Kom**



**PENERBIT ANDI YOGYAKARTA
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
KATA PENGANTAR.....	5
BAB 1. PENDAHULUAN	5
1.1. Pengantar.....	5
1.2. Tujuan Penelitian.....	7
1.3. Urgensi Penelitian.....	7
1.4. Target Temuan.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Peta jalan Penelitian.....	10
BAB 2. MODEL KOMUNIKASI DAN STRATEGI KEBIJAKAN.....	12
2.1. Pengantar.....	11
2.2. Model Komunikasi.....	11
2.3. Strategi Kebijakan.....	12
2.4. Tingkat Kognisi/Pengetahuan dan Pesan Komunikasi.....	13
2.5. Character Building.....	14
2.6. Literasi Media.....	15
2.7. Pendidikan dan Kesadaran anti Korupsi.....	15
BAB 3. PENDEKATAN KOMUNIKASI ORGANISASI DAN RELEVANSINYA.....	17
3.1. Pengantar.....	17
3.2. Pendekatan-Pendekatan Komunikasi Organisasi	17
3.2.1 Pendekatan Tradisional	17
3.2.2 Pendekatan Modern	20
BAB 4. KESADARAN ANTI KORUPSI DAN <i>CHARACTER</i> <i>BUILDING</i>.....	29
4.1. Pengantar.....	17
4.2. Kognisi Pendidikan Kesadaran Anti Korupsi.....	28
4.3. Model Komunikasi dan Strategi Kebijakan.....	31
BAB 5. PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PERSPEKTIF IMAN KRISTEN	45
5.1. Pengantar.....	44
5.2. Beberapa Kasus Korupsi.....	44
5.3. Penyebab Korupsi.....	47
5.4. Korupsi Fenomenal Global.....	53
5.5. Prespektif Iman Kristen.....	54
5.6. Peran Lembaga Pendidikan Kristen.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) tahun 2004-2015 (per 31 Januari 2015)	1
---	----------

DAFTAR GAMBAR

1.1. Metode Penelitian.....	9
1.2. Peta Jalan Penelitian.....	10
2.1. Model Komunikasi.....	11
4.1. Alur Model Kesadaran Anti Korupsi.....	42

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan edisi lanjutan dari laporan penelitian yang memperoleh pembiayaan dari LPPM UK Petra. Adapun isi dari buku ini adalah mengeksplorasi model komunikasi dan strategi kebijakan yang tepat khususnya dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi melalui *character building* berbasis literasi media pada siswa- Sekolah Menengah Pertama (SMP) kota Surabaya.

Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah organisasi penyelenggara pendidikan formal yang dikelola lembaga-lembaga pendidikan swasta berbasis keagamaan yakni sekolah-sekolah Kristen dan Islam di kota Surabaya. Subjek penelitian adalah peserta didik di Sekolah Menengah Pertama, dikarenakan siswa-siswi pada level ini memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk elaborasi pendidikan berbasis *character building* dan masih dalam ranah pendidikan dasar. Sedangkan lokasi penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan pertimbangan bahwa kota Surabaya memiliki proporsi seimbang antara Islam dan Kristen. Selain aspek geografis dan demografis, pertimbangan ideologis pengajaran berbasis agama juga ditonjolkan, sebab banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi dulunya juga bersekolah di sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan.

Metode penelitian menggunakan paradigma kualitatif interpretatif melalui FGD sebagai pengelaborasi tingkat pengetahuan dan kesadaran antikorupsi siswa-siswi dan tenaga pendidik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis diskriptif, gap, komparasi dan korelasi yang dikaji berdasarkan studi *phenomenography*.

Hasil penelitian ini mencakup dua temuan yakni, temuan pertama berupa diskripsi kognitif siswa SMP tentang kesadaran anti korupsi. Kedua, penelitian ini memunculkan model komunikasi dan strategi kebijakan dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi melalui *character building* berbasis literasi media. Output dan luaran penelitian ini adalah modul pembelajaran model komunikasi dan strategi kebijakan kesadaran anti korupsi, dan publikasi/artikel dalam konferensi nasional bidang ilmu komunikasi. Ringkasan hasil riset ini telah juga dipublikasikan pada Konferensi Nasional ISKI di Makassar pada Oktober 2016.

Pada akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini. Mereka adalah Dr. Juliana Anggono, Kepala LPPM UK Petra, Dr. Ido Prijana Hadi dan Desi Yoanita, M.Med.Kom yang dengan kapasitasnya masing-masing telah membantu kelancaran penyelesaian buku ini. Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga untuk segenap dukungan yang diberikan dan juga kepada pihak penerbit yang berkenan mempublikasikan draft buku ini menjadi buku yang layak dibaca. Di atas segalanya, kami sungguh tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kekuatan dan pertolongan dari Tuhan sang Pemilik Kehidupan. Kepada-Nya jua kami haturkan terima kasih untuk seluruh penyertaan yang diberikan dari awal hingga saat ini. Harapan penulis, semoga buku sederhana ini diterima khalayak sebagai wujud partisipasi dalam deseminasi keilmuaan berdasarkan kajian empirik.

Surabaya, 2017

Gatut Priyowidodo, Ph.D.
Yustisia Ditya Sari, M. I. Kom.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Data yang dikeluarkan *Transparency International* 2016 menunjukkan peringkat korupsi di Indonesia naik ke peringkat 90 yang dua tahun (2014) sebelumnya bertenger di angka 107. Meskipun masih di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia. Skor indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia tahun 2016, sudah di atas Thailand, Filipina dan Vietnam. Indonesia mendapat skor 37 itu artinya setara dengan negara-negara seperti Kolombia, Maroko, Liberia dan Republik Makedonia. Tahun 2016, Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara yang diperiksa.

Sementara berdasarkan data Komisi Penanganan Korupsi (KPK) penindakan per 31 Januari 2015, KPK melakukan penyelidikan 14 perkara, penyidikan 5 perkara, penuntutan 4 perkara, inkracht 0 perkara, dan eksekusi 2 perkara. Total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2015 adalah penyelidikan 679 perkara, penyidikan 416 perkara, penuntutan 326 perkara, inkracht 283 perkara dan eksekusi 297 perkara. Berikut ini tabel tabulasi data penanganan korupsi tahun 2004-2015 :

Tabel 1.1. Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) tahun 2004-2015 (per 31 Januari 2015)

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	14	679
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	5	416
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	45	4	326
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	0	283
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	2	297

Sumber : Data Statistik www.acch.kpk.go.id

Fakta penanganan korupsi diatas, menjelaskan bahwa problem korupsi masih menjadi persoalan yang sangat krusial, meskipun beberapa upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan. Hampir seluruh aparat pemerintah pada semua level memiliki contoh pejabat yang terlibat. Ada menteri, anggota DPR/DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota, Polri/TNI dan tidak terhitung lagi pejabat

eselonnya yang lebih rendah tersandung kasus korupsi. Tentu keadaan ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan upaya pencegahan. Beberapa kasus di atas adalah akibat atau kejadian yang sudah terjadi. Sebagai institusi pendidikan yang sangat mungkin dilakukan bukanlah di ranah penindakan atau pengadilan namun adalah tindakan cegah tangkal melalui transformasi nilai-nilai kebaikan publik lewat edukasi dini perilaku anti korupsi.

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Montessori (2012) menjelaskan bahwa pendidikan anti korupsi formal adalah penting dan tidak dapat ditunda lagi. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian itu menemukan bahwa sinergi antara informasi, pengetahuan, dan moral adalah penting. Perlunya pendidikan anti korupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 dan No. 23 Th. 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nafi, (2009) dengan menggunakan metode kualitatif menemukan bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan (*education approach*), hal ini dimaksudkan bahwa harus ada upaya secara preventif untuk mencegah budaya laten korupsi yang ada di Indonesia. Namun, ternyata penelitian ini menemukan bahwa selama ini kurikulum PAI belum memuat materi-materi tentang nilai-nilai antikorupsi, kontekstualisasi pendidikan Islam juga harus segera dilakukan sehingga sesuai dengan ajaran Islam yakni *Sholih likulli zaman wal makan*. (kontekstual di waktu dan dimanapun berada). Rahayu (2009) dalam penelitiannya di SMPN 8 Malang dengan menggunakan metode studi kasus menemukan bahwa perlu pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam pendidikan kewarganegaraan agar materi pembelajaran berjalan efektif.

Fakta lain menunjukkan bahwa topik pendidikan anti korupsi sudah menjadi isu global dan juga menjadi perhatian beberapa peneliti di negara lain. Georgiev (2013) di Sekolah Dasar, Makedonia ditemukan bahwa anak-anak memiliki pemahaman rendah terhadap cara-cara melindungi diri dari dampak negative korupsi, meski tahu bahaya korupsi. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Dimitrova (2005) pada anak-anak Sekolah Menengah Pertama di Bulgaria ditemukan ternyata mereka memiliki pengetahuan dan dampak buruk korupsi yang sangat terbatas. Penelitian tersebut merekomendasi agar dibuat kebijakan pendidikan anti korupsi yang memadai. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alexsanyan (2012) menemukan bahwa sistem pendidikan di Armenia, tingkat korupsi sangat tinggi dan untuk itu perlu pembenahan agar menumbuhkan kesadaran anti korupsi.

Berangkat dari beberapa fenomena dan penelusuran hasil riset terdahulu di atas, dapat dirumuskan bahwa *research gap* dalam penelitian ini terletak pada metode yang digunakan. Penelitian yang ada menekankan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *Phenomenography*. *Phenomenography* adalah metode yang sangat menekankan bahwa setiap individu memiliki variasi pengalaman dan pemahaman subjek yang berbeda terhadap fenomena yang terjadi. Terlebih lagi dengan konteks dan basis ideologi pendidikan yang berbeda. Penelitian ini diharapkan menemukan model komunikasi dan strategi instrumen cegah tangkal perilaku korupsi pada usia muda yakni Sekolah Menengah Pertama (SMP).

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yakni ;

1. Memperoleh deskripsi tentang tingkat kognisi pendidikan kesadaran anti korupsi melalui pendekatan *character building* berbasis literasi media bagi siswa-siswi di Sekolah Menengah Pertama pada sekolah-sekolah yang dikelola lembaga pendidikan Kristen dan Islam di Surabaya.
2. Menemukan model komunikasi dan strategi kebijakan pendidikan kesadaran anti korupsi melalui pendekatan *character building* berbasis literasi media bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama pada sekolah-sekolah yang dikelola lembaga pendidikan Kristen dan Islam di Surabaya.

1.3. Urgensi Penelitian

Model komunikasi dan strategi kebijakan dalam pendidikan anti korupsi melalui *character building* setidaknya adalah metode berskala *preventing* untuk dampak yang lebih jauh terjadinya perilaku korupsi. Untuk melakukan perubahan sikap (*mindset*) dan perilaku anti korupsi, peranan pendidikan sangatlah penting. Hal ini ditujukan sebagai tindakan pencegahan perilaku korupsi bagi tunas-tunas muda yakni anak bangsa.

Dunia pendidikan dengan segala tingkatannya tetap merupakan forum terbaik sebagai lokasi transformasi nilai-nilai kebaikan bersama. Lembaga pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta memiliki peranan yang sangat strategis demi mempersiapkan generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Generasi yang lebih baik tidak hanya dilihat dari kualitas

intelektualnya namun karakter dan nilai moralitas yang melakat pada masing-masing individu sangatlah penting.

Kombinasi dua kekuatan tersebut diharapkan mampu memproduksi pribadi-pribadi unggul yang mampu bersaing dengan mengandalkan daya kreatifitas dan keunggulan komparatif yang obyektif dengan mengedepankan kejujuran, kepatuhan atas aturan serta integritas.

Berangkat dari logika berpikir seperti di atas, maka urgensi tentang menumbuhkan kesadaran anti korupsi melalui pembentukan karakter yang memadai adalah sangat penting. Itu sebabnya penelitian ini sangat urgent untuk dilaksanakan minimal untuk menjawab dua hal. Pertama diharapkan mampu mendiskripsikan tingkat pengetahuan anak didik pada level pendidikan dasar dan menengah tentang kesadaran perilaku anti korupsi. Dan kedua, setelah teridentifikasi level pengetahuan tersebut, maka akan segera bisa dirumuskan tentang model komunikasi dan strategi kebijakan yang tepat sebagai rekomendasi pembuat kebijakan (*decision maker*) baik pada level lokal atau nasional dalam hal pendidikan anti korupsi melalui *character building* berbasis literasi media.

1.4. Target Temuan

Target temuan ini, pada tahap pertama adalah memperoleh diskripsi tentang tingkat kognisi siswa terhadap kesadaran anti korupsi melalui pendidikan *character building* yang dilakukan oleh sekolah sebagai pijakan empiris pembuatan strategi kebijakan. Sementara pada tahap kedua memberikan kontribusi kongkrit terhadap model komunikasi dan strategi kebijakan untuk pencegahan perilaku koruptif melalui pendidikan *character building* di lembaga pendidikan. Invensi ini diharapkan menjadi solusi alternative yang bisa disumbangkan oleh kekuatan *civil society* yakni lembaga penyelenggara pendidikan swasta untuk turut mengkampanyekan kesadaran anti korupsi di Indonesia.

Namun demikian selain temuan penelitian ini dijadikan *role model* pembelajaran yang bersifat aplikatif untuk diimplementasikan pada lembaga pendidikan baik yang dikelola oleh swasta atau pemerintah tetapi target luaran yang paling utama adalah publikasi.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sebagai strategi implementasi riset di lapangan. peneliti

melaksanakan kegiatan *field research* melalui pendekatan kuantitatif yakni dengan penyebaran kuisisioner kepada siswa SMP yang dipilih secara *purposive sampling* di kota Surabaya. Berikutnya, peneliti menggunakan metode *phenomenography* dalam ranah kualitatif. Penelitian ini langsung ke sasaran yakni organisasi penyelenggara pendidikan sekolah di kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), *focus group discussion* (FGD) dan studi dokumenter. Analisis data dilakukan secara *thematic (thematical analysis)* sesuai tahapan analisis studi *phenomenography*.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti kemudian merumuskan dan membentuk model strategi kebijakan yang tepat sebagai rekomendasi hasil akhir riset ini. Berikut metode penelitian ;



Gambar 1.1. Metode Penelitian
Sumber : Olahan Penulis, 2017

Kegiatan pada penelitian ini, yakni :

- Kegiatan 1 (Observasi)
Observasi awal lapangan ke sekolah Surabaya. Peneliti melakukan observasi : profil guru/sekolah, profil siswa, kurikulum *character building* anti korupsi serta kegiatan/program anti korupsi sekolah.
- Kegiatan 2 (Perumusan)
Peneliti merumuskan masalah. Sebagai dasar pembuatan kuisisioner. Kuisisioner dalam penelitian ini berupa pengetahuan dan kesadaran anti-korupsi siswa. Kedua, peneliti membuat materi *Focus Group Discussion* (FGD) yang berkaitan dengan harapan dan kepuasan guru sekolah dengan program *character building*
- Kegiatan 3 (Penyebaran Kuisisioner)

Peneliti melakukan penyebaran kuisioner ke siswa SMP di Surabaya.

- Kegiatan 4 (Analisis Data)

Peneliti melakukan tahapan analisis data, berupa :

- *Identifikasi dan deskripsi Statistik dari :*
 - Tingkat pengetahuan anti-korupsi siswa
 - Tingkat kesadaran anti-korupsi siswa

- Kegiatan 5 (Diseminasi Hasil Penelitian)

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaporkan hasil penelitian berupa diseminasi melalui : Konferensi Nasional ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia) di Makassar dan penerbitan buku.

- Kegiatan 6 (Laporan Hasil Penelitian)

Sebagai hasil akhir penelitian, peneliti melakukan laporan sebagai pertanggung jawaban peneliti.

1.6 Peta Jalan Penelitian



Gambar 1.2. Peta Jalan Penelitian
Sumber : Olahan Penulis, 2017

BAB 2

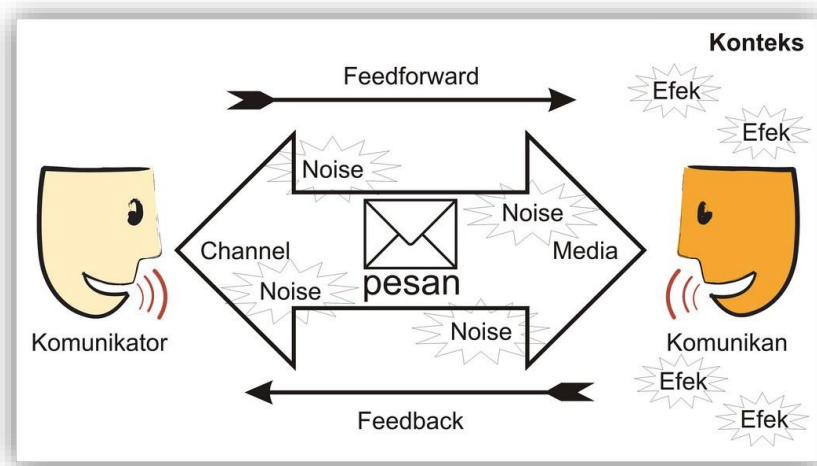
MODEL KOMUNIKASI DAN STRATEGI KEBIJAKAN

2.1. Pengantar

Sekurang-kurangnya terdapat lima teori yang dijadikan prespektif dalam penelitian unggulan perguruan tinggi dengan fokus budaya dan masyarakat yang merupakan salah satu dari tiga fokus penelitian yang dikembangkan Universitas Kristen Petra selain bidang *Sustainable Engineering* dan Ekonomi Kreatif. Penelitian ini secara kongkrit hendak menjawab isu nasional bahwa melalui model sebuah kebijakan atau regulasi, perilaku manusia sebetulnya dapat dirubah. Dalam konteks ini adalah perilaku anti korupsi bagi siswa-siswi SMP dan tenaga pendidik. Peta perjalanan penelitian yang dilakukan melalui beberapa riset terdahulu.

2.2 Model Komunikasi

Mempermudah visualisasi tentang aliran pesan diantara elemen komunikasi yang terlibat dalam aktivitas komunikasi dapat dilihat melalui gambar dibawah ini :



Gambar 2.1. Model Komunikasi
Sumber : Zalabak, 2009

Model komunikasi di atas mendeskripsikan aliran pesan dari komunikator ke komunikan yang sangat mengandalkan media. Media menjadi instrument penting agar pesan diterima utuh dan terjadi *feedback*. Distorsi informasi dan komunikasi seringkali terjadi ketika pesan tidak sepenuhnya dapat diterima sepenuhnya. Masalah ini menurut Mc Quail (2005) dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi media secara inovatif dan kreatif.

2.3 Strategi Kebijakan

Strategi dimaknai sebagai *as a plan, method, or series of maneuvers or strategems for obtaining as a specific goal or result*. Kata tersebut mengacu pada kata Yunani 'strategos' yang berarti komandan militer atau jenderal yang menyampaikan 'stratos' (harafiahnya, padang rumput atau lembah yang terletak di bawah dan kiasannya, berkeah atau tentara) dan egos artinya yang melakukan atau memimpin. Glueck dan Jauch (1989:9) memberikan batasan strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Sementara menurut David (2004:15), strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture.

Pada konteks Indonesia, pendidikan karakter kesadaran anti korupsi dapat dianggap sebagai strategi penting yang memungkinkan dijalankan secara integrative dengan pendidikan formal di sekolah. Terlebih spirit UU 32 Tahun 2004 tentang Sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder. Ini artinya, jika tujuan akhir dari pendidikan merupakan tanggung jawab bersama siswa yang berkarakter dan berintegritas baik, maka iumenjadi tanggung jawab bersama yakni orangtua, sekolah dan masyarakat.

Kebijakan yang diputuskan pemerinta sekedar alat agar semua tindakan dapat dioptimalisasi fungsinya dan dapat diukur serta dievaluasi implementasinya. Terdapat sekurangnya lima jenis strategi kebijakan yakni :

- Strategi Integrasi

Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan / atau pesaing.

- Strategi Intensif

Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.

- Strategi Diversifikasi

Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal.

- Strategi Defensif

Disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Kadang disebut sebagai strategi berbalik (turn around) atau reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencana strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, karyawan dan media.

- Strategi Umum Michael Porter

Menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum. (David, 2004:231)

2.4 Tingkat Kognisi/Pengetahuan dan Pesan Komunikasi

Pengetahuan individu pada dasarnya dapat diukur secara obyektif dan juga subyektif. Ukuran obyektif menekankan bahwa setiap individu menyimpan pengetahuannya dalam ingatan. Sementara pengetahuan secara subyektif harus dilacak melalui, elemen apa yang diingat oleh si individu tentang suatu hal.

Engel (1994,hal.282-289) menyebutkan bahwa sesungguhnya ada tiga kriteria yang bisa diadopsi tentang komponen pengetahuan yang relevan untuk penelitian ini. Pertama, pengetahuan tentang pesan yang pernah diterima. Disini kategorinya mencakup kesadaran,terminologi,sifat dan tingkat kepercayaan. Kedua, pengetahuan terhadap cara memperoleh. Dimensinya terfokus pada kapan pesan itu disampaikan atau disosialisasikan. Serta yang ketiga adalah penggunaan pesan. Artinya setelah tau pesan, bagaimana pesan diperoleh, lalu untuk apa pesan itu.

Selaras dengan Engel, Taylor(2000) menyebutkan bahwa kategori pesan pada dasarnya harus terfokus pada satu poros. Tujuannya, mereka yang membicarakan pesan akan semakin paham dan konsentrasi penuh ketika suatu kolektivitas individu mendiskusikan secara intens. Maka empat komponen utama harus saling menopang yakni konstruksi pengetahuan (*construction knowledge*), bentuk percakapan (*conversation form*), kerangka pengetahuan (*frame knowledge*) dan lingkungan yang kondusif (*circumstances*).

Tingkat pengetahuan menurut Mc Quail (2005) selalu terkait dengan kesadaran terhadap suatu fenomena. Kesadaran melibatkan intensitas interaksi yang mendasari sikap atau tindakan yang dilakukan. Maka individu yang memiliki kesadaran adalah individu yang dapat mengontrol perilakunya secara terukur. Persoalannya menjadi agak rumit ketika individu tidak lagi hanya berpikir untuk dirinya *an sich*, namun sudah merupakan bagian dari sebuah organisasi atau kelompok. Tindakan atau perilakunya mesti pula diorientasikan untuk kepentingan organisasi. Menurut Filemon A. Uriarte,Jr (dalam Wibowo:2013, 148-149) ada empat unsur penting dalam pengetahuan yakni : (1) *knowledge creation and capture* yakni pengetahuan yang diciptakan dalam setiap kelompok,korporasi atau organisasi karena banyak interaksi diantara orang yang membangkitkan pengetahuan. (2) *knowledge sharing and enrichment* yakni pengetahuan yang dibagi melalui diskusi kelompok dan rapat internal. Melalui penyebaran, perdebatan dan diskusi pengetahuan organisasi diperkaya. (3) *Information storage and retrieval* yakni pengetahuan yang dapat diakses karena informasi tersimpan dan tersentralisir. (4) *knowledge dissemination* yakni pengetahuan harus dibagi dan ditransformasi. Artinya berdasarkan empat elemen tersebut, pengetahuan harus dikelola secara baik,jika ingin pemanfaatannya maksimal.

2.5 Character Building

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap siswa. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu

objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan, dan perilaku sebelumnya akan objek (Fishbein & Ajzen, 1973). Menurut Montessori M (2012) kesemua elemen di atas saling berhubungan dan saling bertukar tempat, misalnya reaksi afektif dibayangi oleh perilaku yang biasa dilakukan. Karena itu sikap yang pro pada korupsi bukanlah sebuah kategori saja melainkan juga mengandung hal lainnya.

2.6 Literasi Media

Kegiatan literasi atau penyadatan masyarakat selain menjadi tanggung jawab pemerintah juga dapat melibatkan dunia perguruan tinggi. Kegiatan literasi menurut Potter (2005) awalnya hanya kegiatan yang berorientasi pada kemampuan membaca dan menulis. Tidak mengherankan orientasi awal kegiatan literasi hanya berfokus pada perilaku individu terait dengan kemampuan membaca media baik itu koran, majalah, atau bulletin dan sejenisnya. (Scribner & Cole, 1981, Sinatra 1986 in Pooter, 2005). Pada konteks Indonesia, media literasi dikaitkan dengan pendidikan karakter dalam semangat anti korupsi sangatlah relevan. Paling tidak melalui perkembangan new media sebagai instrumen pembelajaran, konten, pembelajaran yang dianggap sensitif ataupun membisankan akan semakin interaktif. Indonesia yang didera sedemikian massifnya penyakit korupsi yang kronis, sangat memerlukan langkah-langkah progresif terukur melakukan cegah tangal agar penyakit tidak semakin akut dan imun.

2.7 Pendidikan dan Kesadaran Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama Pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik.

Departemen pendidikan Lithuania yang telah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di negaranya sejak 2005 mengatakan bahwa tugas utama dari pendidikan antikorupsi di sekolah

adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana siswa bisa membedakan antara kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya, memberikam argumen yang logis dan rasional kenapa korupsi diaggap sebagai suatu kejahatan, serta menunjukan cara-car yang bisa ditempuh dalam mengurangi terjadinya tindakan korupsi. (Ministry of Education Lithuania, 2006).

Hal yang sama dinyatakan oleh Dharma (2004) secara umum tujuan pendidikan antikorupsi adalah : (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan ketrampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Dengan ketiga tujuan itu dapat dilihat bahwa pendidikan antikorupsi meskipun mempunyai sasaran utama sebagai pendidikan nilai akan tetapi tetap meliputi ketiga ranah pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Bloom yaitu pengembangan ranah kognitif,afektif dan psikomotor siswa.

BAB 3

PENDEKATAN KOMUNIKASI ORGANISASI DAN RELEVANSINYA

3.1. Pengantar

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan komunikasi sebagai bentuk dari aktualisasi diri. Menurut Mulyana, orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis atau ada, inilah yang disebut dengan aktualisasi diri atau eksistensi diri (2007:14). Realitas komunikasi menyarankan bahwa orang menafsirkan pertunjukan dan menciptakan sebuah makna. Makna tidak terkandung dalam pertunjukan atau peristiwa atau kata (Lee & Lee, 1957). Namun makna ini ditunjukkan dalam sebuah pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan.

Komunikasi organisasi, dipandang dari suatu prespektif interpretatif (subjektif) yakni sebuah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Atau proses penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara dan mengubah organisasi. Didalam lingkup pendidikan sebagai suatu lembaga atau organisasi, perlunya komunikasi sebagai proses interaksi dalam mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu pesan komunikasi yang disampaikan kepada publiknya harus tepat dan sesuai tujuan. Berikut ini beberapa pendekatan-pendekatan dalam komunikasi organisasi :

3.2. Pendekatan-Pendekatan Komunikasi Organisasi

3.2.1. Pendekatan Tradisional

Revolusi Industri pada akhir abad kesembilan belas mengubah metode produksi barang. Pada era tersebut, terjadi peningkatan mekanisasi dan industrialisasi yang menyebabkan organisasi kelompok yang lebih besar dari orang-orang di pengaturan pabrik dan perakitan. Tiga teori pada pendekatan Klasik adalah Teori Henri Fayol Manajemen Klasik, Teori Max Weber Birokrasi, dan Teori Frederick Taylor manajemen ilmiah. Pendekatan ini memperkenalkan istilah *metaphor* (perumpamaan) dalam organisasi (Miller, 2009. P. 17-18).

Miller mengungkapkan bahwa dalam organisasi dipandang sebagai *machine metaphor*. Mesin Metafora yang dimaksud terdiri dari beberapa aspek yakni **Spesialisasi**, setiap orang dari sebuah organisasi memiliki fungsi khusus yang menciptakan organisasi. Spesialisasi tugas atau yang

disebut pembagian kerja menggambarkan salah satu cara di mana fungsi organisasi dapat dilihat sebagai kerja sebuah mesin yang terdiri dari bagian-bagian yang memiliki fungsi khusus. Kedua, **Standardisasi** (*replaceability*) ketika konseptualisasi organisasi sebagai mesin, prinsip yang sama berlaku untuk manusia "bagian" yang bekerja dalam organisasi. Jadi jika seorang pekerja di jalur perakitan berhenti, sebagai sebuah organisasi maka posisi orang tersebut dapat dengan mudah digantikan oleh pekerja lain. Personal dipertukarkan karena mereka mewakili "roda" dari mesin. Dan ketiga **Prediktabilitas**, Sebuah organisasi organisasi dipahami sebagai mesin memiliki kualitas yang sama. Ini berjalan sesuai dengan aturan dan standar tertentu, dan jika organisasi mengalami disfungsi, hal itu bisa diperbaiki dengan pertimbangan rasional. (2009, p. 17)

Pendekatan tradisional dalam komunikasi organisasi ini diperkenalkan oleh Henry Fayol yakni *Father of Modern Operational Management Theory*, memperkenalkan konsep elemen dan prinsip-prinsip manajemen. Dalam konsep tersebut Fayol menekankan bagian-bagian dari suatu organisasi disatukan. Teori yang dikemukakan oleh Henri Fayol dikenal sebagai pendekatan Manajemen Klasik/Tradisional.

Konsep elemen manajemen Henry Fayol (1949) didasarkan pada beberapa unsur manajemen diantaranya ;

- Perencanaan, berorientasi pada penentuan cara terbaik untuk mencapai tujuan organisasi
- Pengorganisasian, penataan sumber daya manusia dan evaluasi terhadap karyawan
- *Command*, bagian dimana manajer menetapkan tugas bagi karyawan untuk memenuhi tujuan organisasi
- Koordinasi, kegiatan yang terpisah dari suatu organisasi harus diselarskan menjadi satu kesatuan
- Kontrol, perbandingan antara tujuan dan kegiatan untuk memastikan bahwa organisasi berfungsi dengan cara yang direncanakan

Semua elemen membutuhkan komunikasi antara manajemen dan pekerja. Dengan demikian, komunikasi dapat dilihat sebagai bagian implisit dari teori elemen Fayol tentang manajemen. (Miller, 2009. P. 18).

Fayol juga mengungkapkan dalam Miller (2009, p. 19) prinsip-prinsip manajemen yakni prinsip-prinsip struktur organisasi, kekuasaan organisasi, penghargaan organisasi, perilaku organisasi, diantaranya :

Dalam Prinsip Struktur Organisasi

- **Rantai scalar**

Organisasi harus diatur dalam hirarki vertikal dan komunikasi yang harus sebagian besar terbatas pada aliran vertikal ini.

- **Kesatuan perintah**

Seorang karyawan harus menerima perintah mengenai tugas tertentu dari satu supervisor.

- **Kesatuan arah**

Aktivitas yang seragam berada di bawah pengawasan satu orang.

- **Pembagian kerja**

Usul karya terbaik dapat dicapai jika karyawan ditugaskan untuk sejumlah tugas-tugas khusus

- **Order**

Penempatan harus ada tempat yang ditunjuk untuk setiap karyawan dan tugas dalam organisasi.

- *Span of control*

Manajer akan berfungsi efektif jika mereka memiliki kontrol dari sejumlah karyawan.

Sedangkan prinsip kekuatan organisasi yang diungkapkan oleh Henry Fayol diantaranya: **Sentralisasi**, Semua keputusan dan aktivitas karyawan terpusat atau di bawah pengawasan manajer. **Wewenang dan tanggung jawab**, atasan memiliki otoritas baik yang berasal dari posisi mereka maupun dari pengalaman & intelektual. **Disiplin**, semua anggota organisasi harus patuh pada aturan organisasi. Sedangkan Prinsip-prinsip dalam penghargaan organisasi, yakni **Remunerasi**, Menghargai karyawan sesuai dengan pekerjaannya, **Equity**, Fair dalam memberi penghargaan, **Tenure Stability**, adanya waktu yang cukup bagi karyawan untuk melakukan kinerja yang optimum.

Henry Fayol juga menyampaikan beberapa prinsip sikap organisasi, diantaranya Subordinasi kepentingan individu untuk kepentingan umum yakni suatu organisasi dapat efektif hanya bila kepentingan seluruh mengambil diutamakan daripada kepentingan individu. Dengan demikian, individu harus selalu mendahulukan tujuan organisasi. Kedua, inisiatif yakni manajer harus

menghargai dan mengarahkan upaya karyawan untuk bekerja demi kepentingan organisasi. Ketiga *Esprit de corps* yakni Loyalitas pada organisasi.

Komunikasi dalam pendekatan klasik

Pada ranah kajian komunikasi, penulis juga menemukan bahwa prinsip-prinsip umum yang diwakili oleh ide-ide yang lebih spesifik seperti struktur organisasi, kekuatan, desain kerja, dan sikap, adalah konsep-konsep yang akrab dalam pembahasan struktur berkomunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi mengambil karakteristik tertentu dalam organisasi-organisasi tertentu. Oleh karena itu kami akan mempertimbangkan beberapa aspek komunikasi. Dari teori Fayol subordinasi kepentingan individu untuk kepentingan umum kita dapat mengatakan bahwa komunikasi dalam organisasi harus difokuskan pada topik-tugas yang terkait.

Ada beberapa kemungkinan arah di mana komunikasi dapat mengalir. Dalam pendekatan klasik dari Fayol, Weber dan Taylor rute yang paling penting untuk komunikasi adalah aliran vertikal informasi. Sebagian besar mengalir ke bawah dalam bentuk perintah, aturan, dan arahan, sedangkan saluran komunikasi menurut Henry Fayol dapat memfasilitasi aliran komunikasi. Modus tertulis komunikasi adalah yang paling umum. Komunikasi akan cenderung *top-down*, tertulis, dan tugas yang terkait. Nada bisa sangat formal. Formalitas gaya komunikasi dalam organisasi klasik mungkin juga dapat dilihat dalam komunikasi nonverbal.

3.2.2. Pendekatan Modern

A. Pendekatan Hubungan Manusia

Pendekatan ini digagas dari sebuah studi Hawthorne yang diinisiasi oleh Elton Mayo. Studi ini tertarik pada bagaimana perubahan dalam lingkungan kerja akan berdampak pada produktivitas kerja pabrik. Tim peneliti berusaha untuk menemukan aspek lingkungan tugas yang akan memaksimalkan output pekerja sehingga meningkatkan efisiensi organisasi. Mayo dalam Katherine Miller (2009, p. 36) mengungkapkan bahwa terdapat empat fase utama dalam penelitian yakni ;

1. Studi pencahayaan

Apakah dirancang untuk menentukan pengaruh tingkat pencahayaan pada produktivitas pekerja. Kelompok uji dan kelompok kontrol tidak memiliki perbedaan besar. Kecuali ketika

pekerja sedang yang bekerja di dekat kegelapan, produktivitas cenderung naik pada kedua kelompok dalam semua kondisi.

2. Studi ruang tes perakitan estafet

Para peneliti menyimpulkan bahwa kepuasan sosial yang timbul dari hubungan manusia dalam pekerjaan yang lebih penting menentukan perilaku kerja pada umumnya.

3. Program wawancara

Meskipun tujuan wawancara ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang dampak kondisi kerja namun ditemukan bahwa sebagian besar karyawan berbicara tentang perasaan mereka. Temuan utama dari tahap ini adalah bahwa emosi memainkan peran lebih besar pada pekerja.

4. Studi kamar kabel Bank

Studi ini menyimpulkan bahwa pengaruh kelompok sosial terhadap perilaku pekerja lebih memberikan dampak daripada struktur kekuasaan organisasi formal.

Sedangkan temuan dalam studi Hawthorne mengungkapkan adanya produktivitas yang meningkat sering dikaitkan dengan perubahan dalam lingkungan kerja dan produktivitas juga meningkat ketika insentif gaji ditawarkan kepada pekerja (perakitan relay) (Miller, 2009, p. 37). Dalam hal ini penjelasan emosional dapat ditarik bahwa adanya output pekerja meningkat sebagai akibat langsung dari perhatian kepada pekerja. Fenomena ini dimana dikenal sebagai *Hawthorne Effect*. Output pekerja meningkat melalui faktor sosial informal. Sedangkan gaya manajemen dapat menyesuaikan produktivitas pekerja. Meskipun studi Hawthorne tidak memiliki nilai ilmiah dan kekakuan interpretatif, dampak sosiologis investigasi tidak dapat diremehkan. (Miller, 2009, p. 38).

Teori Maslow : Hirarki Kebutuhan

Abraham Maslow mengusulkan bahwa manusia termotivasi oleh lima kebutuhan dasar (1,2,3, lebih rendah tingkat 4,5 tingkat yang lebih tinggi). Lima kebutuhan dasar Maslow dalam Miller (p. 38) diungkapkan bahwa ;

1. Fisiologis kebutuhan

Kebutuhan tubuh manusia (tidur, makanan air dll) Dalam konteks organisasi ini dapat dilihat sebagai pemberian "upah layak" untuk makanan, pakaian dan lain-lain

2. Kebutuhan Keamanan

Kebutuhan manusia untuk merasa aman, bebas dari bahaya dan ancaman lingkungan. Organisasi dalam hal ini memberikan jaminan perlindungan dan kondisi kerja yang sehat.

3. Kebutuhan Afiliasi

Mengacu pada perlunya memberi dan menerima kasih sayang manusia dan perhatian dari sesama. Hubungan sosial dengan rekan kerja dan manajer menjadi penting bagi pekerjaan seseorang.

4. Kebutuhan akan kepercayaan diri

Mengacu pada keinginan individu untuk merasakan pengakuan terhadap prestasi dan pencapaiannya. Dalam sebuah organisasi, kepercayaan diri seseorang akan terpupuk apabila tidak hanya memperoleh imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya, tetapi juga oleh diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang menantang.

5. Kebutuhan aktualisasi diri

Kebutuhan ini ditandai dengan keinginan untuk mencoba "Menjadi semua yang Anda inginkan". Sebuah organisasi dapat memfasilitasi kepuasan kebutuhan ini melalui penyediaan lapangan kerja yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan tanggung jawab dan kreativitas di tempat kerja.

Maslow menyatakan bahwa lima jenis kebutuhan tersebut diatur dalam secara hierarkhis, yang menunjukkan bahwa kebutuhan tingkat yang lebih rendah harus dipenuhi sebelum seorang individu dapat bergerak dengan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi.

McGregor : Teori X dan Teori Y

Berikutnya pendekatan human resources dalam Miller (p. 40) McGregor menyatakan dalam teori X yakni ; manajer dipengaruhi oleh aspek yang paling negatif dari teori manajemen klasik. Teori Y merupakan manajer adalah orang yang menganut ajaran gerakan hubungan manusia. Ada tiga proposisi manajer berdasarkan Teori X, yakni ;

1. Manajemen bertanggung jawab untuk mengatur material termasuk finansial serta karyawan tujuan-tujuan ekonomi;
2. Bahwa orang harus dikontrol dan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi;
3. Bahwa tanpa intervensi dan arah, orang akan pasif atau resisten terhadap pencapaian kebutuhan organisasi.

Sedangkan teori ini juga menjelaskan bahwa manajer Teori X memiliki sifat, rata-rata karyawan bersifat malas, bekerja sesedikit mungkin. Kedua, Dia tidak memiliki ambisi, tidak suka tanggung jawab, dan lebih suka dipimpin. Ketiga, dia secara inheren egois dan acuh tak acuh terhadap kebutuhan organisasi dan karyawan tidak mudah adaptasi serta mudah dimanipulasi.

Sebaliknya McGregor dalam Miller (p. 41) berpikir bahwa manajer harus berpikir sebaliknya dan bahwa karyawan dimotivasi oleh kebutuhan tingkat tinggi Maslow. Pernyataan ini kemudian membentuk teori Y, yakni karyawan melakukan upaya fisik dan mental dalam bekerja, karyawan memiliki tujuan dan kontrol diri dalam komitmennya melakukan pekerjaan. Dan komitmen terhadap tujuan adalah fungsi dari penghargaan terkait dengan prestasi mereka, karyawan juga untuk mencari tanggung jawab. Karyawan bisa bersifat kreatif dan imajinatif. serta sebagian kemampuan intelektual karyawan juga memberikan manfaat bagi organisasi.

B. Pendekatan Sumber Daya Manusia

Pendekatan Sumber Daya Manusia dalam Miller (2009, p. 43) mengakui kontribusi terutama hubungan manusia klasik dan, pendekatan untuk mengorganisir. Mereka mengakui bahwa individu-individu dalam organisasi memiliki perasaan dan mengakui tenaga kerja individu adalah unsur penting untuk mencapai tujuan organisasi. Di sisi lain mereka mengakui bahwa karyawan memberikan kontribusi kognitif dengan pikiran mereka

Dorongan untuk pendekatan Penelitian Manusia

Ketika melihat studi Hawthorne dalam Miller (2009, p. 43) orang berpikir bahwa model ini tidak cukup untuk menggambarkan, menjelaskan dan mengelola kompleksitas kehidupan organisasi. Terutama muncul pertanyaan apakah prinsip-prinsip hubungan manusia benar-benar bekerja dan apakah mereka bisa disalahgunakan oleh para praktisi organisasi. Gambar di atas menunjukkan bahwa *works factors* merupakan la Pada tingkat yang paling dasar, pendekatan hubungan manusia berpendapat bahwa kebutuhan tingkat tinggi dapat dipenuhi melalui desain pekerjaan, gaya manajemen, dan faktor organisasi lainnya. Ketika kebutuhan-kebutuhan tingkat tinggi puas karyawan harus lebih bahagia dan lebih produktif.

Teori Blake dan Mouton : Grid Manajerial

Blake dan Mouton dalam Miller (2009, p. 46) menciptakan grid sebagai alat bagi manajer untuk menunjukkan gaya kepemimpinan. Mereka mulai dengan asumsi bahwa para pemimpin akan paling efektif bila mereka menunjukkan kepedulian terhadap orang baik dan perhatian untuk produksi (menggabungkan manajemen klasik dengan hubungan manusia). Blake dan Mouton membedakan lima gaya manajemen :

1. Gaya Manajemen Miskin: keprihatinan rendah untuk orang-orang dan perhatian yang rendah untuk produksi
2. Gaya Manajemen *Country Club*: kepedulian yang tinggi bagi orang dan kepedulian yang rendah untuk produksi
3. Gaya Manajemen *Authority Compliance* : keprihatinan rendah pada bawahan dan kepedulian yang tinggi untuk produksi
4. Gaya Manajemen Tim: kepedulian yang tinggi pada karyawan dan kepedulian yang tinggi untuk produksi
5. Gaya Manajemen *Mid of the road* : kepedulian rata-rata pada karyawan dan produksi

Miller mengungkapkan bahwa pada pendekatan Hubungan manusia isi komunikasi menekankan pada tugas atau pekerjaan serta komunikasi yang sifatnya menjaga kualitas hubungan manusia dalam organisasi. pendekatan Sumber daya manusia ini, isi komunikasinya mencakup tugas, hubungan sosial serta inovasi. Pendekatan Hubungan manusia ini juga memiliki aliran komunikasi vertikal, tetapi juga horizontal. Kebutuhan penting adalah komunikasi antara karyawan. Sedangkan saluran komunikasi dalam pendekatan ini menggunakan semua saluran/media. Tidak ada preferensi tertentu untuk saluran karena mereka ingin memaksimalkan produktivitas organisasi yang bersifat informal maupun formal. (Miller, 2009, p. 46).

C. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem menurut Miller digambarkan sebagai sistem metafora pandangan organisasi bukan sebagai mesin mandiri dan mandiri tetapi organisme yang kompleks yang harus berinteraksi

dengan lingkungan mereka untuk bertahan hidup. Sistem metafora dan sistem konsep, studi tentang sistem yang penuh semangat diadopsi oleh teori organisasi (itu berasal biologi). Katz dan Kahn menyatakan bahwa organisasi harus dikonseptualisasikan sebagai sistem terbuka yang kompleks yang memerlukan interaksi di antara bagian-bagian komponen dan interaksi dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Hampir semua sistem teori merangkul aspek-aspek tertentu dari metafora sistem. Dalam hal ini komponen pada tingkat yang paling dasar sistem adalah kumpulan dari bagian, atau komponen. Dalam sistem biologi, bagian ini termasuk sel dan organ. Dalam sistem organisasi komponen ini adalah orang-orang dan departemen yang membentuk organisasi. Singkatnya tugas pertama dari sistem teori adalah untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang relevan yang terdiri sistem. Setelah itu menarik untuk melihat bagaimana komponen ini disusun dan bagaimana mereka bekerja (Miller, 2009, p. 58).

Adapun tiga konsep ciri dari komponen sistem yakni tatanan hierarkhis yakni komponen sistem yang diatur dalam cara yang sangat kompleks yang melibatkan subsistem dan super sistem, bagaimana sistem yang terdiri dari subsistem yang lebih kecil dan tertanam dalam supersystem lebih besar. Kedua, Interdependensi yang menyiratkan bahwa fungsi salah satu komponen dari sistem bergantung pada komponen lain dari sistem. Ketergantungan ini dapat ditemukan di mana-mana bahkan di antara perusahaan multinasional. Berikutnya permeabilitas yakni karakteristik komponen sistem adalah memiliki batas yang memungkinkan informasi dan materi mengalir masuk dan keluar. (Miller, 2009, p. 58).

Proses sistem

Proses sistem yang dalam Miller (2009, p. 61) dalam sistem bekerja melalui proses masukan-throughput-output. Proses pertukaran jelas dalam baik input dan output. Baik input dan output memerlukan proses pertukaran dengan lingkungan luar sistem. Terdapat dua jenis yakni Negatif / koreksi/ penyimpangan-mengurangi umpan balik, membantu mempertahankan fungsi sistem stabil. Dan positif / pertumbuhan / penyimpangan, informasi yang berfungsi untuk mengubah sistem yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi.

D. Pendekatan Budaya

Setiap organisasi pasti memiliki budayanya masing-masing. Menurut pendekatan ini, budaya bisa membuat atau menimbulkan keretakan dalam organisasi dan pendekatan ini sadar bahwa budaya

adalah suatu organisasi. Menurut Deal dan Kennedy's jika organisasi memiliki komponen budaya yang kuat, itu akan membuat tempat yang lebih baik untuk individu untuk bekerja dan akan meningkatkan kepribadian individu dan prestasi organisasi.

E. Pendekatan Kritis

Akar dari pendekatan ini dapat ditemukan dalam karya Karl Marx dalam Miller (p. 99) yang meneliti hubungan antara pemilik modal dan pekerja dalam masyarakat kapitalis. Karl Marx menyimpulkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam hubungan ini yang kemudian menyebabkan pemberontakan. Pendekatan Kritis akan menyebabkan revolusi karena akan mengungkapkan kebenaran mendasar tentang kondisi sosial manusia. Asumsi pendekatan Kritis mereka percaya bahwa struktur sosial tertentu dan proses menyebabkan ketidakseimbangan mendasar kekuasaan, adanya Ketidakseimbangan kekuasaan menyebabkan keterasingan dan penindasan untuk kelas sosial dan kelompok tertentu. Dan ketiga peran teori kritis adalah untuk mengeksplorasi dan menemukan ketidakseimbangan ini dan menggiring perhatian kepada kelompok tertindas.

Dalam Miller (p. 106) beberapa para penganut pendekatan Kritis menyatakan bahwa pengawasan dan struktur dalam organisasi merupakan proses untuk menanamkan ideology dan hegemoni.

Beberapa aspek Ideologi yang menerangkan fungsinya sebagai asumsi tentang realitas yang mempengaruhi persepsi situasi dan peristiwa:

1. Ideologi mengacu pada lebih dari satu perangkat sikap atau keyakinan. Ideologi masuk dalam struktur pikiran anggota organisasi dan membuat anggota organisasi memahami realitas.
2. Ideologi melibatkan asumsi yang jarang dipertanyakan atau diteliti. Misalnya saja hirarki dalam sebuah organisasi tidak pernah dipertanyakan.
3. Ideologi dapat mempengaruhi perilaku kita. Kekuatan ideologi terkait dengan cara sebuah ideology diaplikasikan, digunakan untuk membenarkan dan melegitimasi tindakan.

Dalam memahami ideologi, pendekatan Kritis menegaskan bahwa ideologi bukanlah konsep yang netral namun terkait erat dengan sistem kekuasaan dan dominasi yang mengarah ke hegemoni.

Hegemoni mengacu pada proses di mana kelompok dominan memimpin kelompok lain untuk menerima subordinasi sebagai norma. Kontrol hegemonik biasanya dilakukan dengan

membentuk ideologi sedemikian rupa. Kelompok yang dikendalikan kemudian menerima begitu saja dan secara aktif berpartisipasi dalam proses kontrol.

Menurut pendekatan Kritik, struktur dan proses sosial memungkinkan kelas yang dominan untuk membentuk ideologi organisasi. Hasil monopoli ideologis ini adalah hubungan hegemonik di mana satu kelompok dikendalikan oleh yang lain dengan paksaan, penerimaan atau partisipasi. Pendekatan Kritis mengatakan bahwa melalui emansipasi dan kegiatan perlawanan akan memecah ketidakseimbangan sosial.

BAB 4

KESADARAN ANTI KORUPSI DAN *CHARACTER BUILDING*

4.1 Pengantar

Pembahasan dalam bab ini, bertujuan mengeksplorasi lebih dalam terhadap dua isu penting yang menjadi tema sentral buku ini. Pertama, bagaimana diskripsi tentang tingkat kognisi pendidikan kesadaran anti korupsi melalui pendekatan *character building* berbasis literasi media bagi siswa-siswi di Sekolah Menengah Pertama pada sekolah-sekolah yang dikelola lembaga pendidikan Kristen dan Islam di Surabaya. Dan kedua, menemukan model komunikasi dan strategi kebijakan pendidikan kesadaran anti korupsi melalui pendekatan *character building* berbasis literasi media bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama pada sekolah-sekolah yang dikelola lembaga pendidikan Kristen dan Islam di Surabaya.

4.2 Kognisi Pendidikan Kesadaran Anti Korupsi

Kognisi pemahaman tentang kesadaran anti korupsi minimal terbagi atas tiga kategori yakni pemahaman tentang korupsi, faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, dan cara menumbuhkan kesadaran anti korupsi. model komunikasi dan hambatan menumbuhkan kesadaran anti korupsi serta strategi kebijakan dan peranan institusi dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi.

4.2.1 Pemahaman Tentang Korupsi dalam Lingkup Makro Dan Mikro

Pemahaman subyek penelitian terkait korupsi hampir sama. Ada dua cara melihatnya. Pertama secara makro dalam konteks umum. Mereka menceritakan tentang penyalahgunaan keuangan negara, merampas uang yang bukan miliknya, menggunakan untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, untuk hidup mewah dengan tidak bekerja keras, tindakan untuk mengambil uang negara/uang orang lain tanpa adanya pemberitahuan dan sewenang-wenang untuk mementingkan diri sendiri. Kedua secara mikro dan bersifat empirik yang dirasakan dalam keseharian mereka selaku pelajar. Mencotek pada waktu ulangan, mencuri benda milik kawannya, guru datang terlambat, siswa tidak disiplin dalam mengerjakan tugas, peraturan kelas

atau sekolah yang sering dilanggar, tidak membayar atau membayar kurang kalau berbelanja di kantin, termasuk jika tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru serta beberapa pelanggaran yang harus berurusan dengan guru BK (Bimbingan & Kounseling). Lebih rinci berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* pemahaman informan terkait konsep korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Korupsi itu mengambil uang negara atau uang-uang lain
- b. Korupsi sama dengan mencuri
- c. Korupsi sama dengan mengambil uang negara
- d. Korupsi sama dengan mengambil uang yang bukan hak kita
- e. Korupsi sama dengan menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongannya
- f. Korupsi adalah uang negara yang diambil untuk kepribadian sendiri
- g. Korupsi adalah penyalangunaan amanat untuk kepentingan pribadi

Pemahaman itu pada dasarnya sudah menjelaskan kepada pihak luar atau publik bahwa siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama di Surabaya yang diwakili sebagian dari SMP Islam dan SMP Kristen ini, sudah memahi tentang korupsi.

4.2.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Korupsi

Secara ringkas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi terbagi atas dua yakni faktor internal (diri sendiri, keluarga, adanya "selfpity" atau sikap egois yang mementingkan diri sendiri, serta keadaan ekonomi yang masih merasa kekurangan,) Sementara faktor eksternal (lingkungan tempat kerja, pergaulan, gaya hidup, keinginan memiliki uang yang lebih banyak, gengsi, ekonomi. adanya dorongan dari orang lain. Ingin terlihat mewah terhadap lingkungan sekitar, ingin dipandang sekeliling dan faktor jabatan).

Lebih rinci faktor-faktor yang menyebabkan korupsi adalah:

- a. Factor ekonomi
- b. Butuh uang untuk dirinya sendiri
- c. Untuk memuaskan kehidupan duniawi
- d. Ingin menambah kekuasaan atau kekayaan
- e. Keserakahan
- f. Faktor sosial

Berdasarkan inventarisasi di atas, dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi tersebut menurut pemahaman para responden tidak tunggal. Faktor ekonomi saja ternyata tidak cukup, bahkan menurut salah satu penuturan responden dikatakan Horiah demikian:

“Sering pak yaa saya lihat di televisi itu mereka yang korupsi itu ‘kan banyak yang sudah kaya. Kita bisa lihat dari rumahnya yang besar atau mobilnya yang mewah. Nach itu.. saya kira mereka korupsi pasti bukan hanya masalah kekuarangan uang....”

Jika siswa-siswi SMP saja sudah bisa memahami penyebab korupsi, tentu mereka pada dasarnya juga berpikir bahwa korupsi itu pada akhirnya hanya masalah memperkaya diri sendiri dengan mencuri uang rakyat. Bila kondisi yang merusak seperti itu tidak tertangani secara baik, pasti negara lambat laun juga akan hancur.

4.2.3 Cara Menumbuhkan Kesadaran Anti Korupsi

Harus ada ancaman bagi para korupsi, seperti yang dilakukan di luar negeri. Diberi hukuman yang membuat jera. Membuat UU tentang korupsi, saat pemilu milih pemimpin yang diharapkan. Dengan membiasakan menabung di bank dengan jujur dan baik, supaya bisa untuk masa depan. Untuk selalu bersikap jujur. Jika melakukan sebuah korupsi sebaiknya diberi pengarahan untuk tidak melakukannya lagi dan hukuman yang tepat. Dengan membiasakan hidup jujur (menurut kehendak Allah). Harus ada hukum yang berat agar para koruptur jera hukumnyan, Termasuk ada hukuman pasung, . tembak mati, atau penjara seumur hidup. Sementara pada level cegah tangkal usia dini menurut informan agar diberi pembinaan sejak dini, memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa

Semua informan mengakui bahwa menumbuhkan kesadaran anti korupsi itu persoalan yang tidak mudah dilakukan. Para siswa juga mengetahui apa yang dilakukan sekolah dengan mengajarkan hidup yang jujur atau bahkan yang dilakukan negara melalui dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, secara teori mudah dilaksanakan tetapi dalam praktiknya sangat sulit. Lebih rinci cara menumbuhkan kesadaran anti korupsi dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Sebaiknya menteri keuangan lebih jujur lagi untuk mengatur keuangan negara agar tidak dikorupsi oleh menteri keuangan tersebut
- b. Hukumannya lebih keras agar semua tidak korupsi lagi
- c. Bersikap tertib terhadap suatu hal agar tidak korupsi

- d. Lebih banyakin orang jujur di Indonesia agar tidak terjadi korupsi
- e. Menanamkan kejujuran dari kecil dan bersikap tanggung jawab
- f. Lebih amanat
- g. Memperkuat iman
- h. Kita harus membedakan uang rakyat dan uang kepribadian sendiri
- i. Membiasakan diri agar tidak serakah sejak kecil hingga besar
- j. Bersikap jujur agar tidak melakukan korupsi

Kesepuluh tindakan membangun kesadaran itu menurut mereka diucapkan itu mudah tetapi ketika dilaksanakan sangat sulit.

4.3 Model Komunikasi dan Strategi Kebijakan

Model komunikasi penting dirumuskan setelah mengetahui hambatan menumbuhkan kesadaran anti korupsi. Dari situ dibuatlah strategi kebijakan dan peranan institusi khususnya lembaga pendidikan dalam rangka turut menumbuhkan kesadaran anti korupsi pada level anak-anak sekolah.

4.3.1 Model komunikasi serta hambatan menumbuhkan kesadaran anti korupsi

Diberi penyuluhan oleh lembaga anti korupsi, memberi pelajaran tentang kesadaran anti korupsi. Dengan adanya kantin kejujuran, para siswa dianjurkan untuk membayar sesuai dengan apa yang dibelinya. Pesan disampaikan melalui saluran yang tepat khususnya antara *sender* dan *receiver*. Dalam konteks pelajar Sekolah Menengah Pertama, guru memiliki peran yang dominan dalam distribusi pesan-pesan anti korupsi kepada para siswanya. Model komunikasi yang dilakukan baik di Sekolah berbasis Kristen dan Islam hampir sama, keduanya menggunakan media langsung dan tidak langsung. Media langsung melalui sisipan pelajaran moral di pelajaran PPKN juga Agama. Sementara yang tidak langsung adalah tempelan pesan-pesan kebaikan yang ada di papan-papan pengumuman serta media sekolah.

Secara spesifik diakui para informan atau subyek penelitian bahwa kampanye anti korupsi itu sendiri belum secara terang-terangan dipublikasikan di sekolah mereka. Rincian tentang model komunikasi menumbuhkan kesadaran anti korupsi antara lain disampaikan melalui contoh-contoh praktis berikut :

- a. Pelajaran Pkn, tidak boleh terlambat kesekolah karena menyebabkan korupsi waktu
- b. Menetapkan peraturan. Kita waktu belajar harus tertib, diam, disiplin dan guru yang menerangkan harus didengarkan
- c. Pelajaran IPS, seperti pajak. Tentang korupsi dan keuangan rakyat
- d. Pelajaran agama, karena menjelaskan bahwa korupsi itu berdosa.
- e. Pelajaran Pkn, ditetapkan dengan peraturan kepada anak-anak supaya disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Dan apabila melanggar diberi sanksi
- f. Ya, sekolah memiliki peranan. Seperti pada pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan tentang dilarangnya mengkorupsi uang, waktu dan lain-lain
- g. Pelajaran BK (bimbingan konseling), korupsi waktu, mengenai apabila terlambat maka akan diberi sanksi dan korupsi-korupsi sebagainya
- h. Pelajaran PKn. Ya, sekolah memiliki peranan. Pada saat guru mengajar agar murid tidak korupsi waktu. Dan pada saat guru mengajar agar murid tidak ketinggalan pelajaran yang diberikan.
- i. Ya, sekolah memiliki peranan. Seperti harus mempunyai tanggung jawab seperti tugas bendahara bila ada kehilangan harus bertanggung jawab dan bersikap jujur
- j. Korupsi waktu, bila jam masuk istirahat para siswa yang masih makan akan membuang-buang waktu dan akhirnya menjadi korupsi waktu. Keterlambatan 5 menit dan bila terlambat masuk ada sanksi, bila terlambat lari keliling lapangan, dipanggil orang tua dan tidak ada perbedaan antara cewek dan cowok

Sementara hambatan uraian lebih rinci dapat dicermati melalui uraian dibawah ini :

- a. Tidak, Tidak ada yang melarang karena gerakan anti korupsi ini dapat menumbuhkan masyarakat-masyarakat yang jujur, disiplin, dan tidak berkorupsi. Dimulai dari dalam diri Maharani harus menumbuhkan sikap yang tidak mendekati korupsi dan harus menjauhi korupsi karena korupsi itu tidak baik.
- b. Tidak, karena didikan dari orang tua dan para guru yang selalu menumbuhkan sikap jujur dan mendapatkan tuntutan jika korupsi akan mendapatkan dosa besar
- c. Karena sudah ditanamkan sikap jujur dari kecil oleh keluarga dan para guru yang mengajar

- d. Tidak, karena kita sadar jika melakukan korupsi itu sikap yang tidak bertanggung jawab, disiplin dan tidak tepat
- e. Tidak, karena kita harus menumbuhkan anti korupsi, harus berkata jujur dan apa adanya
- f. Tidak, karena harus menyadarkan diri dulu bila korupsi itu tidak baik dan juga mendapatkan bimbingan.
- g. Tidak, karena kita sekolah agama dan penuh kejujuran, dan ketertiban karena korupsi itu bisa merugikan diri sendiri dan masyarakat lainnya
- h. Tidak, karena disekolah dan dirumah kita diajarkan disiplin, jujur, dan tanggungjawab sejak kecil sampai sekarang, karena korupsi itu sama dengan mencuri
- i. Tidak, karena dengan ditanamkannya sikap jujur dari kecil maka bisa terhindar dari korupsi
- j. Tidak, karena tuntutan dari keluarga dan lingkungan saya jika korupsi itu tidak baik dilakukan dilingkungan kita dan sekitarnya.

4.3.2 Strategi kebijakan dan peranan institusi dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi

Secara eksplisit, subyek penelitian menjelaskan bahwa bila kesadaran siswa belum tumbuh maka perangkat-perangkat hukum yang ada harus secara maksimal bekerja. Misalnya pada tataran nasional KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), lembaga kepolisian dan kejaksaan harus membuat program khusus yang mendorong masyarakat untuk takut korupsi.

Tidak ada hambatan, karena untuk melakukan tindakan anti korupsi itu sangat mudah, terutama pada bagian keuangan. Dengan kejujuran, dan beribadah 5 waktu dan tidak mengambil hak-hak yang tak perlu dilakukan, koruptor-koruptor tersebut mestinya bisa mencegah sendiri agar tidak melakukan tindakan berkorupsi. Masalahnya, menurut informan yang rata-rata masih duduk dibangku kelas III SMP ini, mereka para pelaku korupsi itu sudah tidak malu-malu melakukan pencurian atau perampasan uang negara. Informan 2 mengatakan:

“Rasa malu itu sepertinya sudah hilang ya pak. Meskipun ditayangkan televisi sepertinya mereka malah bangga. Terlihat tertawa mereka lebar-lebar, seolah tidak merasa bersalah. Anehnya lagi, sudah tahu mereka mencuri uang rakyat... lha koq ada juga massa yang cukup banyak membela-bela mereka”.

Hal lain yang juga menjadi sorotan para siswa yang dipilih sebagai informan adalah realitas yang terjadi dalam keseharian. Media yang terus menerus menayangkan ajakan untuk tidak korupsi

sepertinya tidak berimplikasi apa-apa. Meskipun berulang kali iklan tersebut disiarkan oleh televisi terutama, sepertinya tidak membuat jera para koruptor untuk menggarong uang negara. Ironisnya, justru yang melakukan tindakan tersebut adalah mereka yang memiliki jabatan pada pemerintahan yang notabene juga berpendidikan tinggi. Sorang informan mengatakan:

“Sepertinya kami selaku anak-anak sekolah ini pak ya, juga diberi contoh perbuatan yang tidak baik tersebut. Ketika di sekolah, kami diajarkan hal-hal baik tentang kejujuran untuk tidak mengambil milik orang lain, ternyata ketika kami melihat tayangan di televisi bapak-bapak kita yang juga tokoh-tokoh terkenal melakukan tindakan mencuri uang rakyat”.

Perbedaan antara teori dan fakta di lapangan inilah yang membuat keprihatinan kita bersama. Harapan bahwa melalui pendidikan sejak anak-anak tumbuh kesadaran untuk tidak berbuat korupsi dikemudian hari ternyata bertepuk sebelah tangan. Bayangan bahwa nilai-nilai anti korupsi yang sudah ditanamkan tersebut membekali karakter keperibadiannya ketika kelak menjadi pejabat ternyata banyak yang pudar.

Berdasarkan temuan data di atas, ada dua hal yang perlu dibahas yakni pertama tingkat kognisi yang mencakup tiga kategori yakni pemahaman tentang korupsi, faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, dan cara menumbuhkan kesadaran anti korupsi. Dan yang kedua adalah model komunikasi serta strategi kebijakan dan peranan institusi dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi.

Tiga kategori yakni pemahaman tentang korupsi, faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, dan cara menumbuhkan kesadaran anti korupsi adalah poin-poin yang bisa dijadikan sumber telaah dalam membedah lebih dalam mengapa penting tumbuhnya kesadaran anti korupsi tersebut. Mengapa faktor penyebab itu perlu diungkapkan lebih dulu, sebab akibat yang ditimbulkan sungguh luar biasa dampaknya. Hasil penelitian Mauro (1997) seperti dikutip Waluyo (2010) menunjukkan bahwa korupsi memberikan konsekuensi antara lain: 1) Melemahkan investasi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi berkurang. 2) Terjadinya *talent miss allocated*. Artinya korupsi menempatkan orang bukan pada tempatnya. 3) Aliran pinjaman dan hibah dari luar negeri mengalami miss alokasi. Fenomena ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang yang sangat mengandalkan utang dan bantuan luar negeri, termasuk Indonesia. 4)

Melemahnya penerimaan pemerintah dari pajak, sehingga akan mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah. Hal ini akan berdampak terhadap semakin tidak baiknya penyediaan barang dan jasa publik (baik kuantitas dan kualitas).

Bila kondisi itu berketetapan, tidak dapat dibayangkan bagaimana lagi daya saing kita sebagai bangsa. Anak-anak yang seharusnya mewarisi situasi negara yang dapat diandalkan dalam kompetisi global justru terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi karena kesalahan generasi lama yang secara gegabah mengelola negara ini. Itu sebabnya sejak awal penanaman yang benar tentang sikap anti korupsi itu harus betul-betul ditumbuhkan, jangan hanya bersifat retorik tetapi harus terintegral sebagai nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari.

Bahwa ada pandangan lain yang mengatakan tidak semua korupsi akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi, seperti diindikasikan oleh Leff (1964) dan Huntington (1968) tentu bukan pandangan mainstream. Korupsi yang bersifat “*speed money*” berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumen yang dikemukakan yaitu dengan keberadaan suap maka para pengusaha terhindar dari adanya penundaan birokrasi, sehingga semua urusan dengan birokrasi akan berjalan lancar yang berdampak terhadap semua kegiatan usaha berjalan sesuai dengan rencana. Klitgaard (2001) tersedianya “dana taktis” pimpinan birokrat kadang-kadang diperlukan untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan (Waluyo, 2010).

Mungkin pandangan itu ada benarnya tetapi sifatnya pastilah temporer. Agaknya relevan dijadikan contoh adalah Perusahaan raksasa Rolls-Royce mengakui telah menyuap USD2,25 juta serta satu unit mobil mewah Rolls-Royce Silver Spirit kepada oknum tertentu untuk memuluskan kontrak penyediaan mesin Trent 700 untuk Garuda Indonesia. Atau tepatnya Emirsyah Satar ini diduga menerima uang sebesar euro 1,2 juta dan US\$ 180 ribu atau sekitar Rp 20 miliar serta barang senilai US\$ 2 juta. (<https://m.tempo.co/read/news/2017/01/19>). Contoh ini sekedar menggambarkan betapa, meskipun untuk memperlancar birokrasi tetapi dampaknya jauh lebih buruk. Bukan saja untuk perusahaan yang menyuap, tetapi juga individu bahkan institusi yang disuap.

Ketidakpatuhan terhadap aturan dan sistem birokrasi yang dijalankan dan kemudian mencari alternatif pintu ilegal merupakan tindakan berani yang penuh resiko. Aman-aman dan selamat jika tidak ketahuan. Sebaliknya bila ketahuan, ini sama saja merusak martabat kita sebagai bangsa karena penyuap sudah terkategori lintas negara.

Tentu penjelasan di atas agak luas, bila ditarik untuk melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab korupsi dalam ranah pengetahuan anak-anak yang masih duduk dibangku SMP. Tetapi sungguhpun demikian, bila anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan tersebut tidak terlebih dulu diberi pemahaman yang benar terkait dampak ikutan dari korupsi yang kecil-kecil dapat dipastikan implikasinya jauh lebih dahsyat.

Peneliti memiliki keyakinan bahwa tokoh-tokoh yang terjerat kasus korupsi adalah tokoh-tokoh yang cuku terdidik. Akil Mucktar, eks Ketua Mahkamah Konstitusi terlibat korupsi karena kasus pembuatan keputusan sengketa Pilkada dan diganjar hukuman seumur hidup (2013). Beberapa mantan menteri yang pernah tersandung kasus ‘rasuah’ seperti mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yusril Ihza Mahendra atas kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Kemudian ada nama eks Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Menteri di era Megawati Soekarnoputri dan SBY itu terjerat kasus korupsi pengadaan sapi impor, mesin jahit dan sarung. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 2011 lalu, dia hanya dihukum 20 bulan penjara. Setahun sebelumnya Ahmad Sujudi, Menkes di tiga era kabinet, dipidana 2 tahun 3 bulan penjara dan denda kerugian negara Rp800 juta, pasca-divonis Pengadilan Tipikor pada April 2010. Sujudi juga divonis akibat kasus korupsi alkes.

Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri juga pernah merasakan pahitnya hukuman di jeruji besi. Pada 2009 dia dipidana 4,5 tahun penjara atas korupsi dana nonbudgeter. Sedangkan pada 2006, mantan Menteri Agama (Menag) Said Agil Husin al-Munawar juga harus menghuni hotel prodeo selama lima tahun. Said Agil terbukti mengkorupsi dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Dana Abadi Umat (DAU). Mantan Menag yang kemudian “meniru” Said Agil adalah Suryadharma Ali. Mantan Ketum PPP itu terbukti menyalahgunakan jabatan menteri, dalam hal penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM) tahun 2010-2013. Eks anak buah SBY di Kabinet Indonesia Bersatu ini merugikan negara Rp27.283.090.068,-, hingga akhirnya divonis Pengadilan Tipikor enam tahun penjara.

Mantan menteri era SBY lainnya Jero Wacik. Eks Menteri Kebudayaan Pariwisata serta Menteri ESDM ini tersangkut kasus penyelewengan DOM dan divonis empat tahun penjara. Dan yang tak kalah heboh adalah kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang menjerat mantan Menteri Pemuda dan

Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng. Ujung-ujungnya, dia divonis empat tahun penjara.

Begitu pula Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN era SBY ditahan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Dahlan ditetapkan tersangka terkait posisinya selaku Dirut PT PWU periode 2000-2009, atas kasus pelepasan aset BUMD milik Pemerintah Provinsi Jatim.

Terkini adalah penangkapan OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK pada Januari 2017, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar yang ditunjuk SBY dan merupakan kader PAN, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman, untuk memuluskan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk menyebut beberapa saja, pastilah pernah mengenyam pendidikan agama atau kewarganegaraan sewaktu pendidikan menengahnya secara baik. Tetapi faktanya ketika mereka memegang kekuasaan, dan uang begitu dekat dengan mereka godaan untuk berani berkata tidak kepada korupsi sungguh tidak mudah.

Setia dalam perkara-perkara kecil, baru dipercayakan perkara-perkara yang besar memang ada benarnya. Namun seiring berjalannya waktu, keinginan sebagai manusia juga semakin bertambah banyak, menghindari godaan yang amat memikat tersebut sungguh sesuatu yang sulit dihindarkan. Namun bila didalam diri manusia tersebut kokh melekat integritas pribadi yang teruji, godaan apapun past dengan mdah bisa ditepis. Masalahnya, ketika dihadapkan pada pilihan indahnya kenikmatan dan sulitnya kehidupan bila tetap bertahan tidak mau menerima, apakah iman masing-masing orang tersebut tetap dapat bertahan. Jika tetap bertahan, berarti ia berhasil lolos dar jebakan dan berhasil melewati ujian kehidupan. Namun sebaliknya bila gagal, tentu bui dengan sangat terbuka menanti kedatangannya. Sekali lagi ini bukan masalah, tokoh atau bukan tetapi seberapa kuat integritas pribadi yang ditanamkan sebagai nilai-nilai luhur melalau roses pendidikan tersebut dapat dijalankan secara baik.

Sebab itu, integritas harus ditumbuhkan, dibentuk dan dimatangkan dalam satu kepribadian yang memiliki komitmen kuat dalam upaya penangkalan dan pencegahan tindak korupsi. Menurut subyek penelitian sekurangnya ada 11 perilaku yan turut mendukung upaya menumbuhkan kesadaran anti korupsi. Kesebelas poin tersebut tergadai atau dua faktor yakni faktor internal dalam

diri individu tersebut dan faktor eksternal karena dipengaruhi oleh pihak luar. Faktor internal tersebut mencakup :

- Menanamkan kejujuran dari kecil dan bersikap tanggung jawab
- Lebih amanat
- Memperkuat iman
- Kita harus membedakan uang rakyat dan uang kepribadian sendiri
- Membiasakan diri agar tidak serakah sejak kecil hingga besar
- Bersikap jujur agar tidak melakukan korupsi

Sementara faktor eksternal meliputi :

- Hukumannya lebih keras agar semua tidak korupsi lagi
- Bersikap tertib terhadap suatu hal agar tidak korupsi
- Lebih banyak orang jujur di Indonesia agar tidak terjadi korupsi
- Menteri Keuangan yang jujur

Birokrasi yang jujur dan transparan harus dimulai dari pemegang keuangan negara. Siapa? Tidak lain adalah menteri Keuangan. Untuk itu, syarat dari posisi ini adalah orang yang harus lebih jujur. Selama ini biang kerok terjadinya banyak penyelewengan uang negara berasal dari aparat Pajak yang notabene di bawah supervisi Kementerian Keuangan.

Selaras dengan temuan penelitian ini, menurut Suwarno dalam Burhanuddin (2013) menyebutkan, upaya pencegahan (*ex ante*) tindakan korupsi dapat dilakukan melalui: 1) menumbuhkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS; 2) pendidikan anti korupsi; 3) sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik; 4) perbaikan remunerasi PNS. Di sisi lainnya, menurut Wijayanto (2010) menuturkan bahwa gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia dapat teridentifikasi menjadi 4 (empat) pendekatan, yakni: 1) pendekatan pengacara (*Lawyer Approach*); fokus dalam pendekatan ini adalah dengan memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang bertanggung jawab. Imbas dari pendekatan ini adalah

cepat (quick impact) berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor. Pendekatan ini dipandang efektif untuk pemberantasan praktik korupsi dalam waktu yang cepat.

Namun, pendekatan ini membutuhkan biaya yang tinggi; 2) pendekatan bisnis (*Business approach*). Pendekatan ini menitikberatkan pada pencegahan korupsi melalui pemberian insentif bagi pegawai/karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan tidak ada lagi pegawai/karyawan yang melakukan korupsi untuk meningkatkan penghasilannya; 3) pendekatan pasar atau ekonomi (*market or economist approach*). Dalam pendekatan ini, yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar pegawai/karyawan dan sesama klien, sehingga semua pihak berlomba menunjukkan kinerja yang baik, tidak korup, agar dipilih pelayanannya; 4) pendekatan budaya (*cultural approach*). Pendekatan budaya berfokus pada bagaimana membangun dan memperkuat sikap anti korupsi masing-masing individu melalui pendidikan dalam berbagai cara atau bentuk. Meski ada kecenderungan membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilan programnya, namun pendekatan ini dipandang efektif untuk membangun pola pikir dan pemahaman terhadap korupsi kepada generasi penerus bangsa. Pun begitu, pendekatan ini membutuhkan biaya yang murah dalam pelaksanaannya. Pendekatan inilah yang pada akhirnya memberikan inisiatif untuk pengembangan pendidikan anti korup

Kolaborasi temuan lapangan dan pendekatan perspektif tersebut, memungkinkan bahwa sesungguhnya upaya menumbuhkan kesadaran anti korupsi adalah upaya yang membumi. Artinya, bila ada kemauan dan komitmen yang serius dapat dipastikan bahwa langkah-langkah membangun karakter yang anti korupsi tersebut dapat diimplementasikan di lapangan dengan mudah.

Sementara model komunikasi dan strategi kebijakan dalam bidang kesadaran anti korupsi ini perlu dirumuskan secara tegas. Institusi pendidikan meskipun dinilai merupakan pihak yang paling strategis dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi terkesan masih belum optimal menjalankan tugas penting tersebut.

Mengapa demikian? Implementasi kebijakan kurikulum yang menitik beratkan muatan kesadaran anti korupsi belum sepenuhnya diterapkan. Tidak mengherankan dari dua sekolah yang menjadi obyek penelitian ini juga memiliki keragaman dalam menentukan sikap. Bahkan begitu kuatirnya dengan tema yang peneliti pilih di atas, dua sekolah menyatakan menolak untuk menjadi obyek penelitian bertema anti korupsi ini. Meskipun pada awalnya kedua sekolah

tersebut (satu berafiliasi ke Kristen dan satu lagi berafiliasi ke Islam) menerima, namun setelah mempelajari proposal yang peneliti sertakan kemudian ditolak agar tidak memilih sekolahnya sebagai obyek penelitian.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Rahman (1986) seperti dikutip Yuliani (2006) mengemukakan empat strategi untuk memerangi korupsi yaitu : 1) *hesistant-environmental*, 2) *determined-environmental*, 3) *hesistant-institutional*, 4) *determined-institutional*. Masing-masing strategi ini menggambarkan sifat komitmen pemerintah yakni tindakannya lunak atau tegas (hesistant atau determined) dan preferensi pada salah satu jenis ukuran (strategi atau cara) anti korupsi yakni lingkungan atau kelembagaan (*environmental* atau *institutional*). Kriteria lingkungan menekankan pada aspek moral dan sosial dalam memerangi korupsi, misalnya melalui gerakan-gerakan anti korupsi, proyek penyadaran masyarakat, program penanaman nilai-nilai anti korupsi pada anak-anak, Kriteria institusional lebih bergantung pada prosedur administratif dan hukum atau adanya ancaman hukuman yang tegas pada para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi dapat dilihat dari cara ukuran-ukuran anti korupsi diformulasikan dan diimplementasikan. Apabila disusun ukuran-ukuran anti korupsi yang jelas, namun lemah implementasinya ,maka disebut tindakan yang lunak (*hesitant*). Demikian pula jika ukuran-ukuran anti korupsi lemah atau tidak jelas, tapi implementasinya tegas dan kuat, maka juga tergolong lunak.

Hesitant-Environmental Strategy adalah strategi memerangi korupsi melalui gerakangerakan moral yang bersifat diluar kerangka legal-konstitusional. Strategi semacam ini ditandai oleh komitmen emosional yang tinggi pada upaya-upaya menekan atau menghapus tindak korupsi. Bentuk-bentuk tindakannya biasanya berupa program gerakan atau kampanye massa yang diarahkan untuk meningkatkan perasaan anti atau membenci korupsi, sehingga orang mau menghindari dan mengutuk perilaku korup. Biasanya strategi ini tidak direncana dan berbagai komponennya tidak terintegrasi dengan baik. Selain itu ukuran-ukuran anti korupsi bersifat ad hoc dan tergantung situasi atau momen. Gerakan moral anti korupsi biasanya akan lebih banyak digalakkan oleh pemimpin politik pada saat menjelang kampanye pemilu. Karena itu penggerak utama dari strategi ini adalah tokoh-tokoh karismatik atau pemimpin gerakan massa atau tokoh-tokoh agama.

Determined-environmental Strategy adalah strategi gerakan moral yang direncana , diintegrasikan dan diimplementasikan dengan baik. Sifat dan fokus strateginya sama dengan

strategi lingkungan pada umumnya, yakni menekankan pada aspek moral dan nilai dan fokusnya pada meningkatkan kesadaran moral individu, kelompok, dan masyarakat umum tentang dampak buruk perilaku korup. Hanya dalam strategi ini ukuran-ukuran anti korupsinya jelas dan dikembangkan secara sistematis dari berbagai kelompok sosial. Upaya yang sistematis dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di berbagai lembaga (sekolah, keluarga, dan berbagai komunitas) dan struktur yang kebanyakan nonbirokrasi. Kelemahan strategi yang bersifat lingkungan, baik yang lunak maupun yang tegas adalah hanya menekankan pada aspek moral atau ukuran-ukuran sosial, ekstra-legal (diluar hukum) dan non birokratis. Strategi ini kurang atau tidak berupaya untuk mengembangkan dan memperkuat : badan-badan anti korupsi, penyelidikan tentang sebab-sebab rendahnya kinerja birokrat, merumuskan ukuran-ukuran kontrol formal dan informal terhadap pejabat puncak birokrasi melalui pembentukan prosedur dan regulasi tertentu.

Hesitant-Institutional Strategy adalah strategi yang menekankan pada ukuran-ukuran kelembagaan . Ukuran-ukuran yang biasa dipakai adalah : (a) menciptakan hukum atau undang-undang anti-korupsi; (b) mendirikan biro penampung keluhan masyarakat untuk memfasilitasi kerja sama dan partisipasi rakyat dalam memerangi korupsi; (c) memelopori kampanye anti-korupsi dan program pendidikan publik melalui media massa. Kelemahan yang melekat pada strategi ini antara lain : kurang mengupayakan perubahan kebijakan, prosedur dan lembaga dasar administrasi (misalnya menciptakan dan membeayai badan antikorupsi yang independen), menghapus norma-norma administrasi yang longgar, pengenalan sistem pelatihan dan rekrutmen yang dapat mencegah korupsi pada tingkat paling awal. ; inkonsistensi dalam ukuran-ukuran lembaga, prosedur dan kebijakan anti korupsi; dan adanya unsur-unsur simbolisme dalam ukuran-ukuran anti-korupsi tanpa ada pengurangan yang signifikan pada luas atau tingkat korupsi.

Determined-institutional Strategy adalah strategi yang ditandai oleh ukuran-ukuran yang sistematis dan terkoordinir untuk mendeteksi dan menghukum perilaku korup maupun mengeliminasi atau mengurangi berbagai sumber atau penyebab korupsi. Dengan strategi ini, kelas penguasa dikendalikan oleh lingkungan sosial yang merancang ukuran-ukuran prosedural, organisasi, hukum, dan kelembagaan untuk benar-benar menghapus korupsi. Strategi anti-korupsi benar-benar dijalankan secara konsisten dan permanen dan menerapkan sanksi yang sangat tegas. Strategi ini meliputi : (a) menetapkan badan anti korupsi yang independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif; (b) sistem insentif dan hukuman untuk memaksakan implementasi ukuran anti korupsi; (c) sistem pemerintahan yang terbuka ; (d) upaya yang

sistematis untuk mereformasi sistem, prosedur, dan praktek untuk mengurangi secara drastis praktek korupsi; (e) mass media yang bebas sehingga bisa menjadi media kontrol publik.

Visualisasi dari urutan kerja tumbuhnya kesadaran anti korupsi hingga terbentuknya strategi kebijakan pencegahan anti korupsi tersebut dapat dilihat melalui bagan dibawah ini :



Gambar 4.1 Alur Model Kesadaran Anti Korupsi

Sumber : Olahan Penulis, 2017

Intinya pada diskusi terkait kesadaran anti korupsi dan pembentukan karakter yang bisa mengatakan tidak kepada korupsi harus terintegrasi pada semua elemen. Institusi pendidikan memang garda terdepan khususnya dalam menyemai benih-benih pencegahan berkorupsi baik secara individual atau berjemaah, tetapi itupun harus disokong oleh kekuatan lain dalam masyarakat. Kekuatan itu bisa keluarga, institusi sosial, institusi agama, teladan para tokoh, media yang tidak serba hedonis, masyarakat yang menghargai kerja keras tidak suka pamer/ riya kekayaan serta hidup yang terukur dengan penghasilan yang diterima.

Variasi pengalaman yang diungkapkan para siswa sebagai informan penelitian ini menegaskan bahwa beragam bentuk penyimpangan uang negara harus selekasnya diakhiri. Agar apa? Agar Indonesia tidak selalu disorot sebagai negara yang serba korup. Ungkapan para siswa

SMP sejatinya mengekspresikan keprihatinan mendalam melihat sosok para pejabat negara yang begitu terhormat tetapi memiliki karakter kepribadian yang rapuh, mudah silau terhadap uang yang bukan miliknya.

Kesadaran bermedia (literasi media) juga sangat menolong agar upaya cegah tangkal perilaku korup itu sejak awal sudah mulai ditanamkan kepada para pelajar di jenjang pendidikan menengah pertama ini.

BAB 5

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PERSPEKTIF IMAN KRISTEN

5.1 Pengantar

Pemberantasan korupsi tidak bisa berhasil hanya dengan mengandalkan penguatan kelembagaan. Korupsi yang hampir sudah menerjang seluruh sektor kehidupan ibarat penyakit endemic yang sudah sulit diatasi. Terapi kejut, jera dan sanksi sosial sekalipun tidak bakal menjadi solusi tepat mengatasi korupsi. Persoalan pokok terjadinya korupsi adalah mental yang korup, kultur yang korup dan hilangnya jatidiri sebagai entitas sebuah bangsa. Namun karena merupakan manifestasi distorsi tatanan sosial, bagaimanapun pasti ada jalan keluarnya. Sekalipun membutuhkan waktu yang lama, pendidikan antikorupsi sejak usia dini mesti diadopsi sebagai jalan keluar yang bisa dijadikan preferensi untuk cegah tangkal perbuatan korupsi dikemudian hari. Pendidikan antikorupsi adalah '*character building*'. Itu sebabnya harus ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk melaksanakannya di tingkat lapangan. Kurikulum sekolah harus didisain agar materi pendidikan antikorupsi menjadi bagian integral dalam proses implementasi nilai-nilai pendidikan yang wajib diajarkan dan diinternalisasikan kepada peserta didik.

5.2 Beberapa Kasus Korupsi

Tertangkapnya Patrialis Akbar yang adalah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 Januari 2017 ini, karena kasus korupsi sungguh tamparan yang amat memalukan aparat penegak hukum. Ditengah upaya membenahi lembaga peradilan, justru dikejutkan oleh OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu aparatnya. Seakan tidak mau belajar terhadap kesalahan serupa yang dilakukan oleh Akil Mucktar yang notabene adalah mantan Ketua MK pada tahun 2013. Pada sat itu, sang Ketua yang adalah juga kader Partai Golkar ditangkap oleh Komisi Anti Rasuah karena persoalan yang sama yakni korupsi.

Beberapa tahun sebelum itu, Jaksa Urip Tri Gunawan yang merupakan Ketua Tim Jaksa Pemeriksa perkara BLBI juga ditangkap KPK pada Minggu petang (2/3/08) karena menerima suap Rp 6,1 milyar. Ditengah upaya Kejaksaan Agung memulihkan citra, justru pada saat yang sama ada arus balik yang mementalkan. Bahwa aparat penegak hukum tersandung

perbuatan melawan hukum tentu tidak baru kali ini terjadi. Lebih memasgulkan, 26 September 2007 lalu, Irawady Yoenoes salah seorang petinggi KPK juga tertangkap basah karena menerima suap. Lalu apa yang tersisa dari negeri ini, jika setiap hari muncul di media pewartaan bahwa banyak aparat penegak hukum melakukan pelanggaran seperti itu?

Pada bagian lain, tak kalah tragisnya beberapa tokoh pendidikan juga mengalami nasib serupa. Mereka dituduh telah melakukan praktek penyimpangan uang negara melalui berbagai proyek atau jabatan yang dipegangnya. Mereka yang bergelar Profesor dan pernah melakukan korupsi diantaranya adalah Prof. Nazarudin Syamsudin (UI), Miranda S. Gultom (UI), Tafsir Nurchamid (UI), Burhanudin Abdullah (Padjajaran), Rusadi Kantaprawira (Unpad), Rokhmin Dahuri (IPB), Daan Dimara (Universitas Cendrawasih), Rudi Rubiandini (ITB), Abdus Salam (IAIN Cirebon), dan Zarkasih Anwar (Unsri).

Contoh lain adalah mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini yang terjerat kasus dugaan suap di SKK Migas pernah tercatat sebagai guru besar ITB. Profesor perminyakan itu menyelesaikan gelar doktornya di Technische Universitat Calusthal, Jerman. Bukan hanya institusi KPK, Kejaksaan Agung juga pernah menindak dugaan korupsi dana haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar. Said merupakan profesor lulusan Universitas Ummu Al Quro, Mekkah, Arab Saudi, dan masih banyak lagi adalah contoh betapa lebarannya dunia pendidikan tempat sebuah peradaban digodok juga tak kebal dari virus korupsi. (<http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2392-10-profesor-dan-200-doktor-terjebak-korupsi>).

Menjadi pertanyaan kemudian mengapakah aparat penegak hukum dan bahkan pelaku pendidikan ketika sudah memasuki ranah kekuasaan kerap terbius dengan malpraktek kekuasaan? Logika yang dibangun pasti menyalahkan lembaga pendidikan. Pendidikan dinilai telah gagal dalam mereproduksi manusia yang berkualitas, bermartabat dan jujur.

Pendidikan adalah aras terpenting kokohnya sebuah negara. Ia adalah sokoguru konstruksi sebuah bangsa. Itu sebabnya output pendidikan yang baik jelas akan dihasilkan dari sistem dan proses pendidikan yang baik pula. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan untuk proses internalisasi nilai-nilai moralitas. Maka pendidikan harus berangkat dari realitas. Pihak yang paling tahu realitas adalah mereka yang dekat dengan fakta empirik yang digelutinya. Itu sebabnya semangat desentralisasi UU No 32 Tahun

2004, merupakan kata kunci bagi daerah untuk memperbaiki kualitas pendidikannya selain tentunya pijakan hukum UU No 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam konteks desentralisasi dan seiring dengan perwujudan hasil pendidikan bermutu diperlukan kurikulum yang memuat kompetensi umum lulusan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks lokal, nasional dan global. Kompetensi umum ini harus dikuasai siswa di seluruh Indonesia. Dengan demikian, melalui Standar Kompetensi yang berdiversifikasi, keanekaragaman kemampuan daerah dilayani dengan berpijak pada kompetensi umum lulusan¹.

Sekaligus ini juga diharap sebagai solusi alternatif dalam rangka mereproduksi sumber daya insani yang baik bagi pemerintahan sejak usia dini. Salah satu alasan, mengapa aparatur pemerintahan Indonesia amat rentan korupsi adalah akibat suplai calon-calon PNS yang terlebih dulu sudah terinfeksi penyakit kronis sejak usia sekolah. Budaya menerabas telah melekat ibarat pandemi suatu penyakit di setiap level, sehingga harus ada upaya *extraordinary* untuk berani memutus mata rantai mental koruptif tersebut.

Tuntutan tersedianya calon aparatur yang bersih dan berkualitas bukan lagi sekedar retorika jika tidak ingin melihat Indonesia masa depan lebih terpuruk lagi. Bibit unggul aparatur penyelenggara pemerintahan harus disemai pada lokasi persemaian yang kondusif dan tidak mentoleransi terjadinya praktek-praktek penyimpangan sekecil apapun. Untuk itu, sekolah dengan muatan kurikulum yang mengajarkan pendidikan antikorupsi harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Sejak kurikulum pertama pasca Indonesia merdeka yakni kurikulum 1947, kemudian diganti dengan kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum KBK 2004 hingga kurikulum KTSP 2013 ini, pendidikan antikorupsi di semua tingkatan pendidikan (SD, SLTP dan SMA/MA) belum menjadi perhatian utama. Pelajaran Civics, Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila hingga PPKN belum sampai mengelaborasi secara tuntas apa dan bagaimana buruknya implikasi yang dirasakan masyarakat bila sebuah pemerintahan dipraktikkan secara korup.

¹ Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah (Jakarta: Depdiknas, 2004) hlm. iii

Penjabaran Pancasila melalui 36 butir-butirnya terutama sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia berhenti hanya sampai penghapalan: jangan melakukan tindakan yang mementingkan diri sendiri.

Internalisasi nilai-nilai lebih lanjut dari panduan moralitas seperti itu tidak menarik lagi. Karena guru atau sekolah dengan berdalih keterbatasan waktu hanya mampu mengantar peserta didik sampai ke pemahaman itu. Tumbuhnya kesadaran diri tentang pentingnya implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat di luar tanggung jawab mereka dan cenderung terabaikan.

Tidak mengherankan meskipun sudah 7 kali berganti kurikulum, sektor pendidikan tetap dinilai sebagai pihak yang gagal dalam proses reproduksi sumber daya insani yang handal, bermutu dan berakhlak. Koruptor-koruptor yang sekarang sedang memegang peranan di tiga lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun eksekutif swasta yang mengompas uang rakyat melalui BLBI, pembobolan bank dan kejahatan ekonomi lainnya adalah hasil didikan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum yang terus disempurnakan tersebut. Endemik korupsi merambah secara sistemik ke semua lini. Lebih tragisnya justru lembaga pendidikan ikut tergerus irama permainan yang semestinya dijauhi tersebut.

Jika demikian realitas empiriknya, lalu apa kontribusi atau peran aktif lembaga pendidikan kristiani dalam menegaskan jatidirinya dalam mega proyek pemberantasan korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik?

5.3 Penyebab Korupsi

Menurut Tores² penyebab korupsi meliputi keluarga, sekolah, sikap-sikap terhadap pekerjaan, perusahaan, bangsa dan situasi internasional. Dengan kata lain, potensi korupsi bisa dimulai dari institusi terkecil (keluarga, sekolah) hingga pada skala negara. Wignjosoebroto³ pun melihat bahwa korupsi terjadi hanya karena dua sebab yakni sebab ekonomi khususnya kebutuhan akan uang dan sebab kultural.

² Lihat pendapat Fransisco Ramirez Tores yang dikutip Robert Klitgaard, **Membasmi Korupsi** (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998) hlm. xx

³ Soetandyo Wignjosoebroto, "Korupsi Sebagai Masalah Sosial Budaya" Jurnal **Dinamika Masyarakat** Vol.III No.1 Maret 2004 hlm. 270-271

Maka sesungguhnya praktek korupsi tidak lebih dari hasil reproduksi lingkungan yang menyimpang. Sekalipun melimpah regulasi hukum sebagai instrumen penjerat, manakala karakter menyimpang sebagai hasil reproduksi lingkungan tersebut tetap ada, seribu satu macam cara menyasati aturan hukum pasti akan muncul. Terlebih undang-undang, atau peraturan tersebut bersifat statis dan *rigid*, sudah pasti bakal kalah kencang dengan dinamika sosiologis masyarakat. Tidak mengherankan aturan hukum yang ada kerap kali kedodoran mengikuti irama permainan para koruptor.

Sejak jaman VOC abad 17 atau nusantara pra Indonesia, praktek korupsi telah diperkenalkan. Dr.C.J van Leur⁴ adalah pelopor dalam menjelaskan korupsi di lingkungan VOC tersebut. Ia menulis:

“Jika korupsi pegawai VOC memang korup dalam arti aparaturnya yang sangat besar itu dibiarkan bertindak dengan dan diluar hukum setempat (*by laws*), dan bahwa mereka menarik sejumlah keuntungan antara lain dengan pencampuradukan pendapatan pribadi dengan pendapatan resmi, serta dengan menerima pendapatan tidak sah melalui kedudukan resmi, namun tidak ada penilaian terhadap rezim itu”.

Melalui fakta di atas, ingin dijelaskan bahwa sejarah praktek korupsi di jaman kolonialisme telah terjadi. Belum lagi bila itu ditarik ulur ke belakang pada jaman kerajaan, di mana pemerintahan sangat miskin kontrol, pasti lebih menarik lagi.

Praktek korupsi telah bermetamorfosis dalam wajah yang sangat variatif. Tentu jika hanya mengikuti pengertian korupsi standar UNDP sebagai *the misuse of public power, office or authority for private benefit – through bribery, extortion, influence peddling, fraud, speed money or embezzlement*⁵ atau Alatas⁶ menyebut korupsi sebagai penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, korupsi di Indonesia lebih rumit lagi.

⁴ Anhar Gonggong, “Memperkaya Diri Dengan Cara Haram: Dari Tuyul Sampai Korupsi” Jurnal **Dinamika Masyarakat** Vol.III No.1 Maret 2004 hlm.313

⁵ Pengertian yang mirip terdapat di UU. Periksa Pasal 2 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebut tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian..

⁶ S.H Alatas, **Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi** (Jakarta: LP3ES, 1987) hlm.1

Maka sesungguhnya, empat bentuk korupsi model Yves Meny (1992) yang meliputi pertama, korupsi-jalan pintas, kedua, korupsi-upeti, ketiga, korupsi-kontrak, keempat, korupsi-pemerasan dan tiga pola pelapisan korupsi versi Aditjondro⁷, tidak lebih dari afirmasi fakta empirik.

Tiga pelapisan tersebut mencakup korupsi lapis pertama suap (*bribery*) di mana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau penguasa pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara. Pemerasan (*exortion*) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau pejabat pelayanan publik lainnya. Korupsi lapis kedua, nepotisme (diantara mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik), kronisme (diantara mereka yang tidak punya hubungan darah dengan pejabat publik), 'kelas baru' (terdiri dari semua kader partai pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos basah, pos ideologis dan pos yuridis penting). Korupsi lapis ketiga, jejaring (*cabal*) yang bisa mencakup regional, nasional ataupun internasional yang meliputi unsur pemerintahan, politisi, pengusaha dan aparat penegak hukum.

Sejatinya jika diperhatikan secara cermat tampilan negatif aparatur negara tersebut hanyalah ekses. Ekses yang direproduksi oleh sistem nilai dan institusi pendidikan yang secara sistemik juga korup. Otoritas pendidikan dinilai gagal mengantar lulusannya memasuki wilayah pengabdian dengan output akhir selain lulusan yang berkualitas juga berakhlak mulia. Namun institusi tersebut justru menganggap bahwa perilaku korup bukan kegagalan output dunia pendidikan *an sich*, tapi mestinya tanggung jawab bersama.

Itu sebabnya, bagi mereka yang berintegritas tinggi serta masih kuat menjunjung nilai-nilai etika dan moralitas seolah-olah terisolasi dari pergaulan yang korup tersebut. Wilayah ekspresi dan ruang gerak untuk berlaku jujur, akuntabel dan bersih bagi mereka menjadi kian sempit. Lalu muncullah sindiran sinis kepada mereka yang bersih, 'janganlah sok suci', 'hari gini... nggak ikut korupsi?' dan lain-lain.

Hampir di setiap lini kehidupan sektor publik terkena getah korupsi dari yang terkecil hingga yang besar. Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional, yang semestinya menjadi departemen percontohan justru terpuruk sebagai departemen teknis yang

⁷ George Junus Aditjondro, **Membedah Kembar Siam Pengusaha Politik dan Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sistemik bagi Aktivistis dan Wartawan** (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2002)

terlibat praktek penyimpangan tersebut. Bahkan mantan Menteri Agama Said Agil meringkuk sebagai pesakitan karena tuduhan tindak pidana korupsi. Begitu pula lima pejabat tinggi Depdiknas mengalami tuduhan serupa.

Implikasi paling ekstrim terjadinya korupsi adalah tumbuhnya generasi pecundang, tidak bermoral, tidak bermartabat dan hilangnya jatidiri bangsa. Pranata sosial sebaik apapun bila sudah diisi dan dijalankan oleh mereka yang bermental negatif demikian hanya akan mengantar bangsa ini kepada kebangkrutan harga diri.

Begitu parahnya korupsi di negeri ini, sehingga tidak membuat segan *Transparency International (TI)* maupun *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dalam laporan tahunannya. Anehnya, setiap laporan tersebut dipublikasikan tidak pernah membangkitkan rasa malu bangsa ini, dan seolah-olah menerima itu sebagai hal yang biasa, lumrah dan “bangga”.

Pendidikan Antikorupsi

Fokus hasil pendidikan⁸ yang bermutu adalah siswa yang sehat, mandiri, berbudaya, berakhlak mulia, beretos kerja, berpengetahuan dan menguasai teknologi, serta cinta tanah air. Untuk mewujudkan siswa dengan cirri-ciri tersebut perlu dikembangkan kurikulum berdasarkan aspek-aspek:

1. Diversifikasi kurikulum
2. Standar Kompetensi
3. Kurikulum Berbasis Kompetensi
4. Empat Pilar Pendidikan Kesejagatan
5. Partisipasi masyarakat
6. Menejemen Berbasis Sekolah

Dalam kerangka yang demikian ini, diperlukan standar kompetensi mata pelajaran Pendidikan Antikorupsi yang searah dengan jiwa perubahan yang mendasar dalam pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini daerah/sekolah dapat secara efektif menjabarkan standar kompetensi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah/sekolah. Hal mana ini juga selaras

⁸ Kurikulum 2004 Standar Kompetensi, bagian Pendahuluan hlm. Iii. Empat pilar UNESCO tahun 1998 mencakup *learning to know, learning to do, learning to be dan learning together*

dengan spirit Pasal 20 UU No.32 Tahun 2004 tentang asas penyelenggaraan pemerintahan khususnya asas keterbukaan, asas akuntabilitas dan asas efisiensi.

Tebang pilih atau praktek tambal sulam, pemberantasan korupsi bukanlah solusi yang komprehensif. Meskipun ganti presiden ganti pula Inpres tentang pemberantasan korupsi, sepanjang *'political will'* untuk betul-betul hidup bebas korupsi masih lemah, hasil yang dicapaipun tetap tidak memuaskan.

Pendidikan antikorupsi melalui kurikulum berbasis kompetensi (KBK) mesti didesain sebagai solusi alternatif pencegahan usia dini praktek korupsi. Sebab KBK pada dasarnya adalah proses belajar mengajar yang berlangsung dalam rangka pengkonstruksian dan penyusunan pengetahuan oleh peserta didik dengan cara memberi makna dan merespon ilmu pengetahuan sebelumnya. Pengkonstruksian dan penyusunan pengetahuan berlangsung dan dilakukan dari/oleh dan untuk peserta didik. Dengan demikian di dalam penyusunan rencana pembelajaran guru harus mampu menyusunnya sehingga kelas berlangsung dalam suasana *fun*, demokratis dan terbuka⁹.

Pendekatan pembelajaran dilakukan berdasarkan pendekatan konstruktivisme, sains dan teknologi dan pendekatan *inquiri*. Melalui ketiga pola pendekatan tersebut, peserta didik diberikan kesempatan untuk menemukan suatu konsep dengan menggunakan seluruh kompetensi yang dimiliki. Ketercapaian penggalian dan penemuan kompetensi, dilakukan oleh peserta didik itu sendiri sehingga mereka mampu menghayati dan mengamalkan untuk bertaqwa kepada Tuhan YME, rasa ingin tahu, toleransi, berpikiran terbuka, kepercayaan diri, kasih sayang, kepedulian, kebersamaan, kekeluargaan dan persahabatan.

Intinya KBK merupakan strategi implementasi pendidikan. Sementara pendidikan adalah proses *'human development'* berjangka panjang. Maka mustahill mengharapakan segera terjadi perubahan secara dramatis. Dimensi ruang dan waktu amat determinan, sebagai manifestasi kesungguhan bahwa ada upaya kongkrit untuk memutus cabal (jejaring) yang sudah menggurita tersebut.

⁹ Deny Suwarja, "KBK, Tantangan Profesionalitas Guru?" Pendidikan Network <http://www.pendidikan.net/dsuwarja.html>

Menurut Sugita¹⁰, pendidikan antikorupsi bertujuan menanamkan kejujuran, kepedulian, rasa malu, kerjasama sosial serta meningkatkan tenggang rasa kepada peserta didik. Itu sebabnya, setelah mempelajari pendidikan antikorupsi para peserta didik sadar bahwa ketidakjujuran, ketidakpedulian, tidak punya rasa malu, antisosial serta tidak punya rasa tenggang rasa akan merugikan kepentingan bersama. Dalam arti luas, bisa merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Bahwa pendidikan antikorupsi berdiri sebagai sebuah mata pelajaran tersendiri atau bagian dari matapelajaran tertentu adalah soal lain. Paling tidak, pendidikan antikorupsi harus mencakup kejelasan silabus yang berisi empat hal pokok yakni materi yang diberikan, metode yang dipakai, indikator yang ingin dicapai serta alat ukur evaluasi.

Materi kejujuran misalnya, diajarkan kejujuran untuk tidak korupsi waktu. Guru harus memberi teladan secara praktis bahwa terlambat masuk itu adalah praktek korupsi. Karena dengan 'power' yang ia miliki guru telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Metode yang dipakai bisa pengajaran tatap muka, diskusi maupun peragaan. Indikator yang ingin dicapai melalui materi kejujuran tersebut berupa praktek langsung. Guru tanpa sepengetahuan siswa menaruh uang atau barang berharga di kelas. Apakah barang tersebut tetap ditempat, pindah tempat atau justru raib? Bisa pula dalam bentuk kepanitiaan, bagaimana mereka sanggup mempertanggungjawabkan keluar masuk keuangan secara transparan dan akuntabel. Praktek lain, guru memberi test tanpa diawasi atau menjual barang koperasi sekolah tanpa penjaga sehingga pembeli dan penjual bertransaksi dengan hatinuraninya. Alat ukur evaluasi bisa variasi tergantung materi. Dalam hal materi kejujuran, selain tes tertulis juga bisa disilang dengan alat 'lie detector' (bila memungkinkan).

Tersedianya calon aparatur pemerintahan yang cakap, handal dan bermartabat harus secara matang digodok dalam mekanisme proses pendidikan yang bermartabat. Pendidikan antikorupsi dengan segala atributnya, hanya salah satu muatannya. Agen utama lain yang turut menentukan adalah para pendidiknya. Guru dan dosen harus menjadi profesi yang membanggakan dan terhormat, karena dari tangan-tangan merekalah kader masa depan pemerintahan dipertaruhkan.

¹⁰ M.Basuki Sugita, "Pendidikan Antikorupsi (Sumbangsih Guru Untuk Nusa dan Bangsa), **Kompas**, 9 Mei 2005

UU Guru dan Dosen yang sudah mulai diimplementasikan melalui berbagai proyek sertifikasi, tentu langkah kongkrit agar dua profesi tersebut tidak hanya terhormat secara simbolik namun juga ‘bertaji’ secara ekonomik.

5.4 Korupsi Fenomena Global

Fakta, bahwa korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia namun hampir telah menggulung belahan dunia manapun.. Namun itu tidak berarti kita boleh ‘bermain mata’ atau bertindak permisif. Apapun alasannya korupsi sesungguhnya amat menyengsarakan kehidupan rakyat. Tidak hanya saat ini namun juga terwariskan untuk sekian generasi kedepan. Maka tepatlah apa yang dikatakan Sanches¹¹, bahwa jangan sekali-kali putus asa dalam upaya menghambat kanker korupsi. Pasang surut perang melawan korupsi bertalu-talu dikumandangkan. Dari Indonesia masih belia hingga saat ini, pergumulan untuk meluhlantakkan keganasan korupsi terus menjadi tekad yang tak pernah berhenti.

Sejarah membuktikan bahwa sejak tahun 1957 (ketika Indonesia baru berusia 12 tahun) pemberantasan korupsi telah dilaksanakan. Melalui Peraturan Penguasa Militer - Angkatan Darat dan Angkatan Laut RI – Nomor PRT/PM/06/1957 sebagai instrumen pemeriksaan korupsi di lingkungan internal militer hingga dikeluarkannya UU No 3/ 1971 maupun UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disusul Inpres No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, tetap saja meruyaknya praktek penyimpangan uang negara tersebut belum mampu tereliminasi.

Bahkan melihat begitu kompleksnya praktek korupsi di Indonesia seakan-akan 12 strategi pemberantasan korupsi yang ditawarkan Jeremy Pope (2003)¹² yang meliputi peran maksimal legislatif terpilih, peranan eksekutif, sistem peradilan yang independen, auditor negara, ombudsman, badan antikorupsi independen, pelayanan publik, pemerintah daerah, media yang independen, masyarakat sipil, sektor perusahaan swasta dan sektor internasional tidak bermakna apa-apa jika akarnya tidak dimatikan dulu.

¹¹ Oscar Arias Sanches, “Prakata” dalam buku Jeremy Pope, **Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional** (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2003) hlm. xiii

¹² Jeremy Pope, **Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional** (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2003) hlm. 87-282

5.5 Perspektif Iman Kristen

Perkataan korupsi memang tidak sekalipun muncul di Alkitab. Namun itu tidak berarti, korupsi boleh dilaksanakan. Kasus Ananias-Safira (Kisah 5), Yudas sang Bendahara adalah contoh riil betapa nasib malang menghadang jika mereka bermain api dengan kejujuran. Timotius tentu bukan sebagai anggota ‘Gereja/Church Corruption Watch’ ketika ia berteriak nyaring bahwa permulaan kejahatan adalah cinta akan uang. (I Tim 6:10). Tetapi ia sadari kalau akar dari segala kejahatan bermula dari sana.

Jauh sebelum Timotius, Yitro mertua Musa pun sudah mengingatkan agar keadilan dan kejujuran ditegakan jangan berdasarkan uang. Para penegak hukum harus kredibel dan berkarakter. Itu sebabnya tatkala Musa harus memilih para hakim untuk membantunya mengadili perkara, nasehat Yitro adalah pilih yang cakap dan takut akan Tuhan, dapat dipercaya serta tidak mudah disuap (Kel 18:21). Artinya iman, intelektual dan moralitas menjadi harga mati.

“Jangan Mencuri” (Kel 20:15) yang merupakan salah satu dari Sepuluh Hukum, juga amat terang untuk dimengerti dan tidak perlu tafsir apa-apa. Itu artinya, firman Tuhan dengan segala konsekuensinya sungguh amat jelas. Pilihannya terserah kita. Dasar-dasar implementasi kehidupan dalam segala aspek sudah ditetapkan Alkitab. Terang dan tidak rumit. Lalu jika kita dengan sengaja membelokan, tentu kita juga tahu resikonya.

Perspektif iman kristiani dalam merespon segala bentuk deviasi sosial adalah tegas, tidak kompromi dan tidak toleransi. Ketaatan dan kepatuhan akan nilai-nilai kehidupan, tidak datang serta merta. Ia tumbuh dalam internalisasi nilai-nilai yang cukup lama melalui proses pendadaran yang disebut pendidikan.

Pendidikan menjadi poros utama proses produksi sumber daya insani baik untuk kepentingan negara, gereja maupun masyarakat. Mereka adalah stakeholder, yang menjadi cermin terdepan terhadap buram dan terangnya lulusan yang dihasilkan institusi pendidikan kristen.

Itu sebabnya tanggung jawab lembaga pendidikan kristen sungguh tidak ringan. Gelombang demoralisasi yang mengepung dimana kita mengayunkan biduk di tengah samudra

pembelajaran, luar biasa beratnya. Salah ayun sedikit saja bisa-bisa kita terbawa arus. Itulah kata lain, mengapa tidak adanya toleransi dan kompromi atas segala manifestasi deviasi sosial secara tegas harus menjadi sikap utama. Ibarat apalah artinya garam jika sudah kehilangan rasa asinnya.

Lembaga pendadaran kristiani tidak punya banyak pilihan. Ikut arus, terbawa arus atau teguh berdiri menentang arus. Moralitas adalah ‘character building’ yang membutuhkan energi dan sinergi kekuatan ekstra besar secara integratif. Dapat dipastikan jika diantara lembaga yang sangat denominatif berjalan sendiri-sendiri, cepat atau lambat akan tergulung.

Ombak besar mestinya semakin menyatukan langkah ayunan dengan tidak lagi menoleh kanan-kiri kepentingan altar masing-masing. Ingat ketika perahu murid-murid hendak karam? Meskipun satu tim perjalanan, rupanya diantara anggota sudah sangat berpikir bagaimana menyelamatkan diri duluan. Maka lembaga pendidikan kristen mestinya kembali ke fokus utama. Bagaimana bisa sampai tujuan dengan mengibarkan panji Kristus tanpa kehilangan jatidiri sebagai pelita yang bisa menerangi sekeliling.

5.6 Peran Lembaga Pendidikan Kristen

Lembaga pendidikan kristen sekalipun kecil harus terlibat aktif dalam mencegah-tangkal semakin maraknya perilaku koruptif. Perang antikorupsi ibarat melakukan perlawanan kepada proyek megaskandal. Tidak mudah memang, tapi kita mesti ambil peran. Bukankah kesuksesan Daud mengampaskan Goliath bisa menjadi inspirasi sesuatu itu bisa kita lakukan dari yang kecil?

Segala bentuk aturan hukum hanya solusi parsial. Ibarat obat yang hanya mengobati luka. Luka yang satu sembuh, muncul luka yang lain. Begitu seterusnya hingga seujur tubuh luka dan perlu obat. Tidak lekas berpikir, bagaimana hidup sehat terhindar luka dan bebas obat.

Negara yang bersih, ibarat tubuh yang sehat. Indonesia yang bersih dan sehat tetap harapan. Maka penyelenggaraan pendidikan antikorupsi harus dijalankan secara terintegrasi. Topangan dan dukungan subsistem tatanan sosial dan moral yang lain amat menentukan.

Berhasil tidaknya, upaya cegah tangkal praktek koeupsi dapat dilihat hasilnya 15-20 tahun mendatang. Implementasi pendidikan antikorupsi usia dini adalah pemancangan fondasi

'sosrobahu' moralitas generasi mendatang yang berani berkata haram korupsi. Eksistensi Indonesia masa depan, terletak pada kepiawaian cerdas pemegang kendali pemerintahan saat ini untuk mempersiapkan generasi penerus yang bebas korupsi. Maka tiga sikap moral fundamental harus melekat dalam diri setiap individu agar kebal terhadap godaan korupsi yakni kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab (Keluaran 18:21)..

DAFTAR PUSTAKA

- Aleksanyan, H. (2012). *Cases of Corruption and its Prevention in Armenian's Education System*. Oslo: Norwegian Institute of International Affairs (Nufi) *Conceptions*. Saarbrucken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing GmbH
- Adijtondro, G. J. (2002). *Membedah Kembar Siam Pengusaha Politik dan Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sitemik bagi Aktivis dan Wartawan* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
- Alatas, S.H.,(1987). *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES
- Burhanuddin, A., B..(2013). "PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMA KABUPATEN PACITAN." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 5(2)
- David, F.R (2004) *Strategic Management: Concept and Cases*, NJ: Prentice Hall
- Dharma, B. (2004). *Korupsi dan Budaya*. *Kompas Online* 25 Oktober <http://www.kompas.com>. diakses tanggal 20 Oktober 2013
- Dimitrova, NP (2005). *Introduction of Anticorruption Education in the Bulgarian Secondary Schools*, Bulgaria, Sofia: Research and Policy in Development
- Depdiknas, (2004). *Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah* Jakarta: Depdiknas
- Engel, J F. dkk.(1994). *Consumer Behavior*. Orlando: The Dryden Press
- Georgiev, V (2013). *Fighting Corruption Through Education "Anti-Corruption Education Of Primary School Students"* *Proceeding Conference Of The States Parties To The United Nations Convention Against Corruption Fifth Session*. Panama City: SCPC <http://www.dksk.org.mk>
- Glueck, W.F & Jauch, C.R (1991) *Strategy Management and Business Policy* New York: Mc Graw Hill
- Gonggong, A., (2004). "Memperkaya Diri Dengan Cara Haram: Dari Tuyul Sampai Korupsi" *Jurnal Dinamika Masyarakat* Vol.III No.1 Maret
- Hadar, I. A., (2005). "Pendidikan Antikorupsi" *Kompas*, 26 September
- Klitgaard, R., Maclean-Abaroa, R. & Parris, H. L.. (2002). "Corrupt Cities: A Practical Guide To Cure and Prevention." (Terjemahan Masri Maris: Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah), Yayasan Obor Indonesia.
- Klitgaard, R.. (2001). "Controlling Corruption." (Terjemahan Hermoyo: Membasmi Korupsi) Yayasan Obor Indonesia.
- Klitgaard, R.,(1998).. *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- McQuail, D. (2005). *McQuail's mass communication theory* edition: 5. London: SAGE.
- Megawangi, R. (2007). "Membangun SDM Indonesia Melalui Pendidikan Holistik Berbasis Karakter." [http://www.xl.co.id/files/Indonesia berprestasi/presentasi Ratna Megawangi, pdf](http://www.xl.co.id/files/Indonesia%20berprestasi/presentasi%20Ratna%20Megawangi.pdf).

- Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania Open Society Fund-Lithuania (2010). *Project Preventing Corruption Through Education, Information And Consciousness-Raising*
- Miller, K. (2009). *Organizational Communication Approach and Processes*. Toronto: Thomson Nelson
- Montessori, M.(2012) Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah *Jurnal Demokrasi* 11 (1)
- Nafi, A. (2009) *Pendidikan Antikorupsi : Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Pai) Atas Pendidikan Antikorupsi*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsby.ac.id/8064/>
- Pherali, T.J. (2011). *Phenomenography as a Research Strategy, Researching Environmental*
- Potter, W.J.,(2005). *Media Literacy* London: Sage Publication
- Priowidodo, G.(2007). Pendidikan Antikorupsi Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi : Solusi Cegah Tangkal Korupsi Usia Dini *Jurnal Humanitas* 1 (2) p12-19
- Priowidodo, G.,(2008). Pendidikan Antikorupsi Dalam Perspektif Iman Kristiani Untuk Membangun Struktur Masyarakat Yang Berdaya Saing *Proceeding Konferensi Integrasi Iman Ilmu*. Surabaya. UK Petra
- Puspito, N.I d& Tim (2011). *Buku Pedoman Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemdikbud
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional* Jakarta Yayasan Obor Indonesia
- Riberu, J. (2004). "Revolusi di Dunia Pendidikan Indonesia" *Suara Pembaruan*. 14 Mei
- Rahayu, A.S (2009) *Implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaran di SMPN 8 Malang* : <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/12533>)
- Rahman, A.T.R. (1986). *Legal and Administrative Measures Against Bureaucratic Corruption in Asia*, dalam Ledivina V. Carino (Ed.), *Bureaucratic Corruption in Asia : Causes, Consequences and controls*, Quezon City, JMC Press Inc., .
- Smith, L., Joseph, C., & Patrick, C.L.H. (2008). The stability and change of trait emotional intelligence, con ict communication patterns, and relationship satisfaction: A one-year longitudinal study. *Personality and Individual Differences*. 45.738-743.
- Sanches, O. A.. (2003). "Prakata" dalam buku Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional* Jakarta Yayasan Obor Indonesia
- Suseno, F. M., "Pendidikan Antikorupsi" © Copyright 1999 Masyarakat Transparansi Indonesia The Indonesian Society for Transparency <http://www.transparansi.or.id>
- Sugita, M.B. (2005). "Pendidikan Antikorupsi: Sumbangsih Guru Untuk Nusa dan Bangsa" *Kompas*, 9 Mei
- Suwarja, D., "KBK, Tantangan Profesionalitas Guru?" *Pendidikan Network* <http://www.pendidikan.net/dsuwarja.html>
- Taylor R. J., Carole G., L. H., & Elisabeth v E. 2007. "Communication as The Modality of Structuration" dalam Craig, R.T., Heidi L.M., *Theorizing Communication Reading Across Traditions*. London: Sage

Waluyo, J. (2010). "Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan: 1 Suatu Studi Lintas Negara." *Buletin Ekonomi* (2012). Buletin Ekonomi Vol. 8, No. 2, Agustus hal 70-170

Wigiyosoebroto, S. (2004). "Korupsi Sebagai Masalah Sosial Budaya" *Jurnal Dinamika Masyarakat* Vol.III No.1 Maret

Yi-Ting, Y., & Alison D., (2001). "The contribution of emotional satisfaction to consumer loyalty". *International Journal of Service Industry Management*. 12 (3). 234 – 250.

Yuliani, S. (2006). Korupsi Birokrasi : Faktor Penyebab Dan Penanggulangannya *Jurnal "DINAMIKA"* Vol. 6 N0.1

Zalabak, S.P.S. (2009). *Fundamental of Organizational Communication, Knowledge, Sensitivity, Skills, Values*. Boston: Pearson Allyn & Bacon

Media Massa:

Kompas, 7 Maret 2008

Jawa Pos, 7 Maret 2008

http://www.ti.or.id/media/documents/2017/01/26/c/o/corruption_perception_index_2016_design.pdf-2.pdf

Indeks Korupsi. <http://www.acch.kpk.go.id>

BIODATA PENULIS



Gatut Priowidodo, Ph.D menyelesaikan pendidikan S1 pada Universitas Hasanuddin Makassar (1992) dan Magister dari PPS Universitas Airlangga (1999). Sementara jenjang pendidikan doktornya di bidang Komunikasi Organisasi diselesaikan pada tahun 2013 pada *Northern University of Malaysia* (UUM) di Kedah-Malaysia. Selain sebagai dosen pada Fikom UK Petra Surabaya, ia juga beberapa kali menerima hibah penelitian dari DP2M Dikti sejak tahun 2009.

Beberapa tulisannya telah dipublikasikan baik pada media lokal maupun internasional. Ia juga aktif sebagai narasumber untuk telaah Komunikasi Politik pada beberapa media cetak dan elektronik seperti Kantor Berita Antara, SCTV, SBO TV, Trans 7, Trans TV dan Suara Surabaya. Selain itu juga aktif dalam mempresentasikan papernya di beberapa *International Conference* seperti, *18th AMIC Annual Conference Media, Democracy and Governance: Emerging Paradigms in a Digital Age*, New Delhi (2009), *2nd International Conference on Communication and Media 2010 (i-COME'10): Communication and Society: Challenges and Engagement*, Melaka-Malaysia (2010), 2011 Shanghai International Conference on Social Science, (SICSS2011) di Shanghai-China (2011), International Conference on Humanities and Social Sciences, "Transforming Research for Sustainable Community", Pattani- Thailand (2011), *2nd International Soft Science Conference* di Oscar Saigon Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam (2011) *International Conference On Social Sciences*, Bucharest (2014) dan *Asia-Pacific Communication Conference*, Bandung (2015).

Beberapa artikel dalam International Journal terindeks SCOPUS : *The Faces of Conflict in a Political Organization: The case of the Indonesia Democracy Party of Struggle* (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan /PDI-P) *Mediterranean Journal of Social Sciences* Vol.No.19 , August 2014 dan *Politics and Organization in Opposition: Patterns of Communication and Decision Making* in *Parti Keadilan Rakyat* (the People's Justice Party) of Malaysia *The Social Sciences*, Vol.11 No. 2 February 2016



Yustisia Ditya Sari, S. Sos.,M. I. Kom adalah Dosen tetap Program studi Ilmu Komunikasi UK Petra, Surabaya. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fikom-UK Petra dan Magister di bidang Komunikasi PR (Public Relations) pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung (2012). Selain aktif melakukan riset baik yang didanai LPPM maupun Dikti, ia juga aktif dalam mempublikasikan karya tulisnya dan sejumlah jurnal ilmiah dan konferensi. Beberapa konferensi yang pernah diikuti sebagai pemakalah antara lain : *The 4th International Communications Research Conference : Culture, Conflict, and Communications* dengan judul paper: “Implementation Corporate Social Responsibility Migas Hess Indonesia’ Jakarta (2013) dan Konferensi Nasional Entrepreneurship, Good Governance dan Reengineering Tata Lingkungan Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia dengan judul paper: “Presepsi Ibu Menyusui mengenai Kampaye ASI Eksklusif di Puskemas Jagir Surabaya” Yogyakarta, (2014).